



Pemerintah Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta



RENJA

RENCANA KERJA

2024

INSPEKTORAT
daerah istimewa yogyakarta



3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Perpu Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 2);
8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 – 2027;
9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 91 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat.


MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Tim Penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 dengan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;

- KEDUA : Tugas Tim Penyusun Rencana Kerja Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 sebagaimana dalam DIKTUM KESATU Keputusan ini adalah:
- a. Menyiapkan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD;
 - b. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan tahun sebelumnya;
 - c. Menetapkan program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja dan target kinerja yang dicapai Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2024 berdasarkan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD);
 - d. Menyusun rencana kerja perangkat daerah yang terdiri :
 - Rancangan Awal Renja Tahun 2024;
 - Rancangan Renja Tahun 2024;
 - Rancangan Akhir Renja Tahun 2024.
 - e. Melaksanakan Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah yang bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang telah disusun dalam rancangan awal rencana kerja perangkat daerah.
- KETIGA Rencana Kerja Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 memuat kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan serta kegiatan pembangunan yang dilaksanakan Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta c.q. Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan : di Yogyakarta
Pada tanggal : 9 Januari 2023

INSPEKTUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

MUHAMMAD SETIADI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN INSPEKTUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR : 07 /KPTS/2023
TANGGAL : 9 Januari 2023

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA)
INSPEKTORAT DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2024

NO.	JABATAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI
I.	Ketua	Muhammad Setiadi, S.Pt., M.Acc.	Inspektur DIY
II.	Sekretaris	Totok Purwoirawan, SKM. M.Acc	Sekretaris Inspektorat DIY
III.	Anggota	1. B. Norowisnu, S.Kom, M.Hum.	Kasubbag Program dan Monev
		2. Dian Rohmawati, S.Si., MAP	Kasubbag Umum
		3. Nur Laili Rahmawati, SE	Staf Sub Bagian Program dan Monev
		4. Dessy Nur Fauziah, S.STP	Staf Sub Bagian Program dan Monev
		5. Ilham Ismu Pambudi, SIP	Staf Sub Bagian Program dan Monev

INSPEKTUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

MUHAMMAD SETIADI



KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadiran Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Tahun 2024 telah selesai disusun sebagaimana mendasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Dengan mengacu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) DIY Tahun 2024 dan berpedoman pada Renstra Inspektorat DIY Tahun 2023 – 2027, maka disusunlah Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta yang berisikan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka menunjang pencapaian visi dan misi Kepala Daerah untuk 1 (satu) tahun.

Besar harapan kami, usul dan saran perbaikan atas Rencana Kerja Inspektorat DIY Tahun 2024.

Yogyakarta, 27 Juli 2023

INSPEKTUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
INSPEKTORAT
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
MUHAMMAD SETIADI, S.Pt., M.Acc.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB 1 PENDAHULUAN	1-1
1.1 Latar Belakang.....	1-1
1.2 Landasan Hukum	1-2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	1-2
BAB 2 HASIL EVALUASI RENJA INSPEKTORAT DIY TAHUN 2022	-1
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Tahun 2022 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	2-1
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan.....	2-19
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi.....	2-27
2.4. Review terhadap Rancangan Awal Renja	2-36...
2.5. Penelaahan Usulan Progran dan Kegiatan dari Masyarakat.....	2-54
BAB 3 TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	3-1
3.1. Tujuan dan Sasaran.....	3-1
3.2. Program dan Kegiatan	4.....
BAB 4 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	4-1
BAB 5 PENUTUP	5-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Capaian Kinerja Inspektorat – Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tahun 2022	2-2
Tabel 2.2.	Capaian Kinerja Inspektorat – Program Penyelenggaraan Pengawasan Tahun 2022	2-3
Tabel 2.3.	Capaian kinerja Inspektorat DIY - Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi Tahun 2022	2-7
Tabel 2.4.	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Inspektorat dan Pencapaian Renstra Inspektorat s/d Tahun 2023 Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta	2-8
Tabel 2.5.	Realisasi Kinerja Inspektorat (Urusan Penunjang Pemerintah Daerah – Pengawasan Pemerintah Daerah) Tahun 2022	2-19
Tabel 2.6.	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Inspektorat	2-21
Tabel 2.7.	SDM Inspektorat DIY	2-30
Tabel 2.8.	Sarana dan Prasarana Pendukung	2-31
Tabel 2.9.	Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024	2-37
Tabel 2.10.	Usulan Program, Kegiatan, dan Subkegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta	2-54
Tabel 3.1.	Target Kinerja Inspektorat DIY Tahun 2024	3-2
Tabel 3.2.	Rekapitulasi Rencana Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024	3-4
Tabel 3.3.	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024 Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta	3-5
Tabel 4.1.	Tabel Rencana Kerja dan Pendanaan Inspektorat DIY Tahun 2024	4-2

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan sinergitas dan akselerasi pencapaian *tujuan (comon goals)* dan pembangunan yang telah dirumuskan bersama dan menjadi komitmen semua pihak maka setiap SKPD harus menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD), yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang sah dan harus dilaksanakan.

Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja SKPD adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan untuk periode kerja pembangunan 1 (satu) tahun dan sesuai dengan tugas dan fungsi PD.

Inspektorat DIY menyusun Renja Inspektorat DIY Tahun 2024 dengan mengacu kepada Rancangan RKPD DIY Tahun 2024 dan berpedoman pada Renstra Inspektorat DIY Tahun 2022-2027. Renja Inspektorat DIY Tahun 2024 sebagai dokumen perencanaan tahunan kemudian akan menjadi dasar pertimbangan dalam penyusunan dukungan anggaran dalam proses penganggaran. Kemudian, pada tahap pelaksanaan pembangunan daerah, Renja Inspektorat DIY Tahun 2024 akan menjadi dasar monitoring dan evaluasi di tahun bersangkutan sehingga dapat diketahui progres pencapaian sasaran pembangunan pada urusan pengawasan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan oleh Inspektorat DIY di tahun 2024.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rancangan Renja Inspektorat DIY Tahun 2024 mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :

1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1959;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah sebagaimana telah dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-13.17 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005 – 2025;
12. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2027;

13. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 91 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Inspektorat;
14. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2022-2027;
15. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

1.3 Maksud dan Tujuan

Berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait dengan penyusunan Rancangan RKPD, Inspektorat DIY menyusun Renja Inspektorat DIY Tahun 2024 dengan maksud melaksanakan tugas dan fungsi untuk periode 1 (satu) tahun. Sedangkan tujuannya adalah untuk memberikan arah yang jelas dan pedoman pelaksanaan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan tahun anggaran 2024.

1.4 Sistematika Penulisan

- Bab 1 Pendahuluan
- Bab 2 Hasil Evaluasi Renja Inspektorat Tahun Yang Lalu
- Bab 3 Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan
- Bab 4 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
- Bab 5 Penutup

BAB 2 HASIL EVALUASI RENJA INSPEKTORAT DIY TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan, bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/ atau kegiatan baru yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah.

Pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan dalam pencapaian kinerja tahun 2022 secara umum dapat dicapai dengan baik. Sampai akhir Desember 2022 realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp26.807.728.357 atau 92.40% dari alokasi anggaran Rp29.011.657.600. Anggaran tersebut terdiri belanja operasi sebesar Rp20.255.434.969 dan belanja modal sebesar Rp19.478.930.000.

Pada tahun 2022 Inspektorat telah melaksanakan 3 (tiga) program 12 (dua belas) dan 39 (tiga puluh sembilan) sub kegiatan, dengan capaian masing-masing program sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Program ini dilaksanakan dalam rangka mendukung meningkatkan kualitas kinerja Inspektorat DIY, dengan indikator Persentase peningkatan pengembangan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan, Persentase peningkatan kualitas pegawai dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran, Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur sebesar 100% dan capaian kinerja sebesar 100%. Program ini dilaksanakan melalui 8 (delapan) kegiatan dan 24 (dua puluh empat) sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp21.868.747.350. Dari anggaran tersebut teralisasi sebesar Rp 20.048.324.376 atau 91.68%. Adapun rincian kegiatan dan sub kegiatan program ini dengan target dan capaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 2.1 Capaian kinerja Inspektorat DIY - Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tahun 2022

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator kegiatan/sub kegiatan	Anggaran			Indikator		
			Pagu	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1.	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah; koordinasi dan penyusunan DPA SKPD; dan evaluasi kinerja perangkat daerah	28.479.000	28.435.243	99,85%	100%	100%	100%
1.1.	Sub Kegt Penyusunan Dok Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan sesuai dengan kaidah yang berlaku : 1. Renstra 2. Renja 3. Renja Perubahan 4. Perjanjian Kinerja	11.836.000	11.818.624	99,85%	1. 1 dokumen 2. 1 dokumen 3. 1 dokumen 4. 1 dokumen	1. 1 dokumen 2. 1 dokumen 3. 1 dokumen 4. 1 dokumen	100%
1.2.	Sub Kegt Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	- Tersusunnya dokumen RKA perubahan tahun - Tersusunnya dokumen DPA Perubahan tahun - Tersusunnya dokumen DPA tahun n + 1 - Tersusunnya dokumen RKA tahun n + 1	7.849.000	7.839.094	99,87%	- 1 dokumen - 1 dokumen - 1 dokumen - 1 dokumen	- 1 dokumen - 1 dokumen - 1 dokumen - 1 dokumen	100%
1.3.	Sub Kegt Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dg Nilai "A" - Realisasi capaian fisik dan keuangan sesuai tahapan ROPK	8.794.000	8.777.525	99,81%	- 1 dokumen - 100%	- 1 dokumen - 100%	100%
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya penyiapan gaji dan tunjangan, koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan akhir tahun SKPD, koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran, pelaksanaan penatausahaan dan pengujian verifikasi/keuangan SKPD	15.065.772.350	14.552.842.044	96,60%	100%	100%	100%
2.1.	Sub Kegt Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarkannya gaji dan tunjangan ASN	15.014.663.350	14.501.739.738	96,58%	1 tahun	1 tahun	100%
2.2.	Sub Kegt Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan OPD	45.840.000	45.840.000	100%	1 tahun	1 tahun	100%
2.3.	Sub Kegt Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan keuangan sesuai dengan realisasi penggunaan anggaran, dokumen perencanaan anggaran dan dapat memberikan informasi keuangan bagi pengguna informasi (laporan keuangan tahunan)	1.260.000	1.258.500	99,88%	1 laporan	1 laporan	100%
2.4.	Sub Kegt Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1. Laporan Keuangan bulanan 2. Laporan keuangan triwulanan 3. Laporan keuangan semesteran	4.009.000	4.003.806	99,87%	1. 12 dok 2. 4 dokumen 3. 1 dokumen	1. 12 dok 2. 4 dokumen 3. 1 dokumen	100%
3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya enatausahaan barang milik daerah pada SKPD	15.900.000	13.200.000	83,02%	100%	100%	100%
3.1.	Sub Kegt Pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya penatausahaan BMD sesuai dengan ketentuan yang berlaku	15.900.000	13.200.000	83,02%	1 tahun	1 tahun	100%

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator kegiatan/sub kegiatan	Anggaran			Indikator		
			Pagu	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
4.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai, pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas pokok dan fungsi	441.171.000	140.864.139	31,93%	100%	100%	100%
4.1.	Sub Kept Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kerja Pegawai	Terfasilitasinya penilaian Angka Kredit bagi JFT dalam 2 periode	5.422.000	5.408.300	99,75%	1 tahun	1 tahun	100%
4.2.	Sub Kept Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	- Aparat pengawasan yang meningkat kemampuannya melalui Bimtek - Jumlah pegawai yang meningkat kompetensinya terkait JFT	435.749.000	135.455.839	31,09%	- 6 Angkatan - 20 orang	- 6 Angkatan - 20 orang	100%
5.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, penyediaan barang cetakan dan penggandaan, penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD serta dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	352.251.000	346.156.882	98,27%	100%	100%	100%
5.1.	Sub Kept Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen peralatan kelistrikan dan bangunan kantor	4.244.000	4.236.090	99,81%	6 jenis	6 jenis	100%
5.2.	Sub Kept Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1. Alat Tulis Kantor 2. Penyediaan perlengkapan penatausahaan arsip	40.537.000	40.052.609	98,81%	1. 11 jenis 2. 14 jenis	1. 11 jenis 2. 14 jenis	100%
5.3.	Sub Kept Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1. Barang cetakan 2. Jumlah materi yang digandakan	24.474.000	24.473.000	100%	1. 6 jenis 2. 71360 lembar	1. 6 jenis 2. 71360 lembar	100%
5.4.	Sub Kept Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1. Terselenggaranya konsultasi dan koordinasi 2. Tersediannya makanan dan minuman rapat	193.016.000	188.495.183	97,66%	1. 1 tahun 2. 1 tahun	1. 1 tahun 2. 1 tahun	100%
5.5.	Sub Kept Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Blueprint pengembangan aplikasi pengawsan yang terintegrasi	89.980.000	88.900.000	98,80%	1 dokumen	1 dokumen	100%
6.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Pengadaan Mebel, Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4.282.088.000	3.589.728.750	83,83%	100%	100%	100%
6.1.	Subkegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kendaraan dinas jabatan	636.290.000	633.000.000	99,48%	1 unit	1 unit	100%
6.2.	Sub Kept Pengadaan Mebel	Meubelair	1.977.948.000	1.797.339.750	90,87%	11 jenis	11 jenis	100%
6.3.	Sub Kept Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya peralatan dan mesin lainnya: 1. Komputer 2. Lemari Es 3. Televisi 4. Vertical blind 5. Trolley (Arsip) 6. Tabung Pemadam	534.095.000	484.943.000	90,80%	1. 3 unit 2. 2 unit 3. 2 unit 4. 343 m2 5. 1 unit 6. 10 unit	1. 3 unit 2. 2 unit 3. 2 unit 4. 343 m2 5. 1 unit 6. 10 unit	100%

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator kegiatan/sub kegiatan	Anggaran			Indikator		
			Pagu	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
6.4.	Sub Kept Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan kantor lainnya : Instalasi system hydrant	1.133.755.000	674.446.000	59,49%	100%	100%	100%
7.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.324.132.400	1.030.949.268	77,86%	100%	100%	100%
7.1.	Sub Kept Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pembelian materai	7.280.000	7.038.690	96,69%	340 buah	340 buah	100%
7.2.	Sub Kept Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bukti pembayaran rekening telepon, rekening listrik, rekening air	317.388.200	163.054.362	51,37%	12 bulan	12 bulan	100%
7.3.	Sub Kept Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1. Pembayaran jasa keamanan kantor 2. Pembayaran jasa kebersihan kantor 3. Pembayaran jasa pelayanan driver 4. Pembayaran retribusi sampah	999.464.200	845.142.138	84,56%	1. 12 bulan 2. 12 bulan 3. 12 bulan 4. 12 bulan	1. 12 bulan 2. 12 bulan 3. 12 bulan 4. 12 bulan	100%
8.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan; pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	358.953.600	346.148.050	96,43%	100%	100%	100%
8.1.	Sub Kept Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1. Bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan dinas/operasional roda 2 2. Bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan dinas/operasional roda 4 3. Kendaraan dinas/operasional roda 2 yang dipelihara 4. Kendaraan dinas/operasional roda 4 yang dipelihara	279.101.800	266.296.250	95,41%	1. 4 unit 2. 13 unit 3. 4 unit 4. 13 unit	1. 4 unit 2. 13 unit 3. 4 unit 4. 13 unit	100%
8.2.	Sub Kept Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya : 1. Komputer 2. Laptop 3. Mesin fotocopy 4. AC 5. LCD 6. Genset 7. Lift	79.851.800	79.851.800	100%	1. 23 unit 2. 20 unit 3. 1 unit 4. 23 unit 5. 3 unit 6. 1 unit 7. 1 unit	1. 23 unit 2. 20 unit 3. 1 unit 4. 23 unit 5. 3 unit 6. 1 unit 7. 1 unit	100%

Sumber: Inspektorat DIY (2023)

2. Program Penyelenggaraan Pengawasan

Program penyelenggaraan pengawasan dilaksanakan dengan indikator Persentase Kinerja Perangkat Daerah Pemerintahan, Perekonomian, Sosial Budaya serta Sarana dan Prasarana dengan target 90% dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi kinerja sebesar 108,6%; realisasi ini merupakan hasil persentase jumlah rekomendasi yang selesai ditindaklanjuti dibagi total jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan dikali 100%. Program ini dilaksanakan melalui 2 (dua) kegiatan dan 9 (sembilan) sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp6.469.788.250. Dari anggaran tersebut

terrealisasi sebesar Rp6.124.075.991 atau 94,66%. Adapun rincian kegiatan dan sub kegiatan program ini dengan target dan capaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 2.2 Capaian kinerja Inspektorat DIY - Program Penyelenggaraan Pengawasan tahun 2022

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator kegiatan/sub kegiatan	Anggaran			Indikator		
			Pagu	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1.	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah, Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah, Reviu Laporan Kinerja, Reviu Laporan Keuangan, Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota, Kerjasama Pengawasan Internal, Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	5.590.120.500	5.244.561.264	93,82%	100%	100%	100%
1.1.	Sub Kegt Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja Pemerintah Daerah	341.537.000	315.031.799	92,24%	16 LHP	16 LHP	100%
1.2.	Sub Kegt Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	1. Laporan cash opname dan stock opname OPD 2. Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan Pemerintah Daerah	3.589.698.500	3.436.067.102	95,72%	1. 37 Laporan 2. Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan Pemerintah Daerah	1. 37 Laporan 2. Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan Pemerintah Daerah	100%
1.3.	Sub Kegt Reviu Laporan Kinerja	1. Laporan Evaluasi Kinerja OPD 2. Laporan Evaluasi LKJiP Pemerintah Daerah DIY 3. Laporan Hasil Pendampingan dan Penyusunan Manajemen Resiko OPD 4. Laporan Reviu Dokumen Perencanaan Pemerintah Daerah DIY 5. Laporan Reviu Dokumen Perencanaan SKPD DIY sebelum tanggal persetujuan RAPBD Tahun 2023	692.430.000	598.294.812	86,41%	1. 37 LHE 2. 1 Laporan 3. 37 Laporan 4. 1 Laporan 5. 37 Laporan	1. 37 LHE 2. 1 Laporan 3. 37 Laporan 4. 1 Laporan 5. 37 Laporan	100%
1.4.	Sub Kegt Reviu Laporan Keuangan	1. Laporan Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD 2. Laporan Reviu Laporan Keuangan Pemda DIY	453.138.000	428.576.300	94,58%	1. 37 laporan 2. 1 laporan	1. 37 laporan 2. 1 laporan	100%
1.5.	Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	1. Laporan EKPPD Kabupaten/Kota 2. Laporan Hasil Pemeriksaan Umum/Teknis Pemerintah Kab/Kota	379.129.000	334.540.282	88,24%	1. 5 Laporan 2. 16 Laporan Hasil Pemeriksaan Umum/Teknis Pemerintah Kab/Kota	1. 5 Laporan 2. 16 Laporan Hasil Pemeriksaan Umum/Teknis Pemerintah Kab/Kota	100%
1.6.	Kerjasama Pengawasan Internal	1. Laporan Telaah Sejawat antar Inspektorat Provinsi 2. Laporan Telaah Sejawat Inspektorat Kab/Kota	110.874.000	108.741.404	98,08%	1. 1 laporan 2. 1 laporan	1. 1 laporan 2. 1 laporan	100%
1.7.	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Laporan hasil monitoring dan tindaklanjut temuan	23.314.000	23.309.565	99,98%	2 laporan	2 laporan	100%

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator kegiatan/sub kegiatan	Anggaran			Indikator		
			Pagu	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
2.	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Terlaksananya penanganan penyelesaian kerugian negara/daerah; pengawasan dengan tujuan tertentu	879.667.750	879.514.727	99,98%	100%	100%	100%
2.1.	Sub Kegt Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Laporan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara	36.500.000	36.429.148	99,81%	4 laporan	4 laporan	100%
2.2.	Sub Kegt Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	843.167.750	843.085.579	99,99%	102 LHP	102 LHP	100%

Sumber: Inspektorat DIY (2023)

3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

Program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi dilaksanakan dengan indikator Persentase Kinerja Perangkat Daerah Pemerintahan, Perekonomian, Sosial Budaya serta Sarana dan Prasarana dengan target 90% dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi kinerja sebesar 108,6%; realisasi ini merupakan hasil persentase jumlah rekomendasi yang selesai ditindaklanjuti dibagi total jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan dikali 100%. Indikator program ini sama dengan indikator program penyelenggaraan pengawasan karena adanya penyesuaian program, kegiatan dan sub kegiatan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomerklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri 050-3708 Tahun 2020 yang mulai dilaksanakan tahun 2021 serta menyesuaikan dengan RPJMD tahun 2017-2022, maka program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi ini mendukung capaian program penyelenggaraan pengawasan. Program ini dilaksanakan melalui 2 (dua) kegiatan dan 5 (lima) sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp673.122.000. Dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp651.376.848 atau 96,77%. Adapun rincian kegiatan dan sub kegiatan program ini dengan target dan capaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 2.3. Capaian Kinerja Inspektorat DIY - Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi Tahun 2022

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator kegiatan/sub kegiatan	Anggaran			Indikator		
			Pagu	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1.	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Terlaksananya perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan perumusan kebijakan teknis di bidang fasilitasi pengawasan	58.084.000	51.615.106	88,86%	100%	100%	100%
1.1.	Sub Kegt Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	1. Keputusan Gubernur yang mengesahkan PKPT tahun 2023 2. Laporan Gelar Pengawasan Daerah	10.767.000	9.362.629	86,96%	1. 1 SK 2. 1 Laporan	1. 1 SK 2. 1 Laporan	100%
1.2.	Sub Kegt Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Laporan pemutakhiran tindaklanjut hasil pengawasan	47.317.000	42.252.477	89,30%	2 Laporan	2 Laporan	100%
2.	Pendampingan dan Asistensi	Terlaksananya pendampingan dan asistensi urusan pemerintahan daerah; pendampingan asistensi, verifikasi dan penilaian reformasi birokrasi; koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi	615.038.000	599.761.742	97,52%	100%	100%	100%
2.1.	Sub Kegt Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan pendampingan dan asistensi	6.681.000	6.678.622	99,96%	4 Laporan	4 Laporan	100%
2.2.	Sub Kegt Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Laporan hasil pelaksanaan PMPRB DIY tahun 2021	9.497.000	8.175.795	86,09%	1 Laporan	1 Laporan	100%
2.3.	Sub Kegt Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	1. Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 2. Laporan Hasil Pengendalian Gratifikasi Pemerintah Daerah 3. Laporan Tindaklanjut perjanjian APIP dan APH 4. Laporan triwulanan atas perkembangan pelaksanaan tugas Saberpungli tepat waktu	598.860.000	584.907.325	97,67%	1. 1 Laporan 2. 1 Laporan 3. 1 Laporan 4. 4 Laporan	1. 1 laporan 2. 1 Laporan 3. 1 Laporan 4. 4 Laporan	100%

Sumber: Inspektorat DIY (2023)

Adapun rekapitulasi hasil pelaksanaan Renja s.d. 2022 sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 2-4 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Inspektorat dan Pencapaian Renstra Inspektorat s/d Tahun 2023 Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama Perangkat Daerah : INSPEKTORAT

Lembar : 1

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan TahunLalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
					Target Renja perangkat Daerah Tahun (n-2) 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2023	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
1	Urusan Pemerintahan										
1	01	Bidang Urusan Pemerintahan									
1	01	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	100%	33.35%
1	01	01	01	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran	Tertatanya Arsip Aktif / In Aktif 12 bulan	N/A	100%	N/A	N/A	100%	33.35%
				Alat tulis kantor 19 jenis							
				Komponen instalasi listrik dan bangunan kantor 12 jenis							
				Pembelian Meterai							
				Pengiriman surat khusus peranko							
				Peralatan kebersihan dan bahan pembersih							
				Pengisian tabung pemadam kebakaran							
				Tagihan rekening telepon 5 sambungan, rekening listirk 500 Kwh, rekening air 10 m3							
				Langganan 4 jenis surat kabar harian							

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
					Tagihan internet up to 2 MBps								
					Paket pengiriman								
					Retribusi sampah kantor								
					Jasa kebersihan gedung kantor								
					Pajak/STNK kend dinas/operasional roda 2								
					Pajak/STNK kend dinas/operasional roda 4								
					Barang cetakan								
					Penggandaan dokumen dokumen								
					Fumigasi arsip/Arsip terdigitalisasi								
					Pembelian buku								
1	01	01	02	Penyediaan Jasa Pengelolaan Pelayanan Perkantoran	Kinerja 1 orang pengelola kepegawaian dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	33.35%
					Kinerja 9 orang pengelola keuangan dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku								
					Kinerja 10 orang keamanan kantor dalam 1 tahun sesuai dengan SPK								
					Kinerja 1 orang pengurus barang dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku								
					Kinerja 1 orang penyimpan barang dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku								
					Kinerja 1 orang perencana program dalam 1 tahun								
1	01	01	03	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi Dan Konsultasi	Makan dan minum rapat tersedia sesuai kebutuhan dalam 1 tahun	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	33.35%
					Konsultasi dan koordinasi dalam dan luar daerah terlaksana dengan baik selama 1 tahun								
1	01	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	33.35%
1	01	02	107	Pembangunan Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor	D E D gedung Kantor/Gedung Kantor	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	33.35%
					Terselesaikannya pembangunan gedung tempat bekerja	-							

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	01	02	108	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Perlengkapan kantor sesuai RKBMD 1 jenis	N/A	-	-	-	-	N/A	N/A	N/A
					Peralatan kantor sesuai RKBMD 3 jenis								
					Meubeleir sesuai RKBMD 2 jenis								
1	01	02	111	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan	AC Split sesuai RKBMD 30 unit	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	33.35%
					Perlengkapan gedung kantor sesuai RKBMD 13 jenis								
1	01	02	113	Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	Kendaraan dinas/operasional roda 2 sesuai RKBMD 5 unit	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	33.35%
					Kendaraan dinas/operasional roda 4 sesuai RKBMD 15 unit								
1	01	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	33.35%
1	01	05	003	Peningkatan Kapasitas Jabatan Fungsional Tertentu	Aparatur yang meningkat kemampuannya melalui diklat : 5 orang	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	33.35%
					Aparat pengawasan yang meningkat kemampuannya melalui Bimtek : 2 angkatan 55 org								
1	01	05	007	Pembinaan, pengembangan kualitas profesi dan penilaian angka kredit Jabatan Fungsional Tertentu	Daftar Penilaian Angka Kredit dan Karya Tulis JFA dalam 1 tahun	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	33.35%
1	01	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	33.35%
1	01	06	016	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD SKPD	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang capaian kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMP, Renstra dan IKU)	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	33.35%
1	01	06	017	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang ditetapkan	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	33.35%
1	01	06	018	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD Serta Pengembangan Data dan Informasi	Dokumen Perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan SKPD	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	33.35%

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
					Dokumen draft Renstra yang sesuai dengan RPJMD 2018-2022								
1	01	06	019	Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	Terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	33.35%
1	01	38		Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Terwujudnya Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	N/A	109.70%	N/A	N/A	N/A	N/A	109.70%	36.56%
1	01	38	001	Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	Laporan Hasil Pemeriksaan Reguler	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	33.35%
					Laporan Pengukuran Kinerja Tahun Anggaran 2016								
					Laporan Evaluasi LKJiP								
					Laporan Hasil Pendampingan								
					Laporan Review Laporan Keuangan SKPD DIY								
					Laporan Review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah DIY								
					Laporan Review RKA SKPD DIY								
					Laporan Monev SPIP SKPD								
					Laporan Telaah sejawat antar Inspektorat Provinsi								
					Laporan Pendampingan Pengelolaan Dana Keistimewaan DIY SKPD								
					Laporan Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD								
					Laporan Cash Opname dan Stok Opname SKPD								
					Consulting dan Quality Assurance Pengawasan SKPD								
1	01	38	003	Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH	Laporan monitoring dan evaluasi Aksi Daerah Pencegahan, Pemberantasan Korupsi	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	33.35%
					Laporan Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi Pemerintah Daerah								
					Laporan Pelaksanaan PMPRB (Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi) DIY th 2018								
					Laporan Triwulanan atas perkembangan pelaksanaan tugas Satgas Saber Pungli tepat waktu								

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

1					2					3					4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	01	38	007		Koordinasi Pengawasan Yang Lebih Komprehensif	Keputusan Gubernur yang mengesahkan PKPT	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
1	01	38	009		Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Laporan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) 5 daerah kabupaten/kota	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	33.35%	
1	01	38	010		Gelar Pengawasan Daerah dan Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	Rekapitulasi hasil pengawasan	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	33.35%	
						Rekapitulasi hasil tindaklanjut pengawasan																
1	01	38	011		Monitoring, Evaluasi dan Inventarisasi Temuan Pengawasan	Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	33.35%	
						Laporan Pajak-Pajak Pribadi PNS 5500 PNS																
1	01	38	014		Pemeriksaan Khusus di Lingkungan Pemerintah Daerah	Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus/Kasus	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	33.35%	
6					UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN																	
6	01				INSPEKTORAT DAERAH																	
6	01	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	
6	01	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Laporan Hasil Forum OPD - Tersusunnya dokumen tahunan (tahun n+1 dan perubahan tahun n) dan lima tahunan OPD Tersusunnya dokumen perencanaan sesuai dengan kaidah yang berlaku: <ol style="list-style-type: none"> 1. Renstra : 1 dokumen 2. Renja : 1 dokumen 3. Renja Perubahan : 1 dokumen 4. Penetapan Kinerja : 1 dokumen 	100%	N/A	100%	100%	100%	-	100%	200%	100%							
6	01	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersusunnya dokumen RKA tahun n+1	N/A	N/A	100%	100%	100%	N/A	100%	100%	100%							
6	01	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersusunnya dokumen RKA Perubahan tahun n	N/A	N/A	100%	100%	100%	N/A	100%	100%	100%							
6	01	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	<ul style="list-style-type: none"> - Tersusunnya dokumen DPA tahun n+1 - Tersusunnya dokumen RKA tahun n+1 - Tersusunnya dokumen RKA Perubahan tahun n - Tersusunnya dokumen DPA Perubahan tahun n 	100%	N/A	100%	100%	100%	100%	200%	100%								

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
6	01	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tersusunnya dokumen DPA Perubahan tahun n	N/A	N/A	100%	100%	100%	N/A	100%	100%
6	01	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKJIP)	N/A	N/A	100%	100%	100%	N/A	100%	100%
6	01	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Realisasi capaian fisik dan keuangan sesuai tahapan ROPK : 100% - Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKJIP) : 1 dokumen	100%	N/A	100%	100%	100%	100%	200%	100%
6	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									
6	01	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	- tersedianya pemenuhan gaji dan tunjangan ASN - terbayarkannya gaji dan tunjangan ASN	- 100%	N/A	100%	100%	100%	- 100%	100%	100%
6	01	01	1.01	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan OPD: 1 tahun	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	200%	100%
6	01	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	- Tersusunnya laporan keuangan tahunan OPD - Laporan Keuangan sesuai dengan realisasi penggunaan anggaran, Dokumen Perencanaan Anggaran dan Dapat Memberikan Informasi Keuangan bagi Pengguna Informasi (laporan keuangan tahunan) : 1 dok	- 100%	N/A	100%	100%	100%	- 100%	200%	100%
6	01	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan keuangan sesuai dengan realisasi penggunaan anggaran, dokumen perencanaan anggaran 1. Laporan Keuangan bulanan 2. Laporan Keuangan Triwulanan 3. Laporan Keuangan Semester	- 100%	N/A	100%	100%	100%	- 100%	200%	100%
6	01	01	1.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersusunnya LRA sem 1 dan Laporan Prognosis semester berikutnya	N/A	N/A	100%	100%	100%	N/A	100%	100%
6	01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									
6	01	01	1.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Terfasilitasinya penilaian Angka Kredit bagi JFT dalam 2 periode	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	200%	100%
6	01	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Aparatur yang meningkat kemampuannya melalui diklat	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	200%	100%
6	01	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implentasi Peraturan Perundang-undangan	- Aparat pengawasan yang meningkat kemampuannya melalui Bimtek - Daftar Penilaian Angka Kredit 2 periode dalam 1 tahun	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	100%	100%

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
6	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah									
6	01	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen peralatan kelistrikan dan bangunan kantor 6 jenis	100%	N/A	100%	100%	100%	100%	200%	100%
6	01	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tabung pemadam kebakaran 3 buah 1. Alat tulis kantor : 11 jenis 2. Penyediaan perlengkapan penatausahaan arsip :14 jenis	- 100%	N/A	100%	100%	100%	- 100%	200%	100%
6	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	- Barang cetakan 12 jenis - Jumlah materi yang digandakan 71360 lembar	100%	N/A	100%	100%	100%	100%	200%	100%
6	01	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bukti pembayaran Langganan surat kabar/majalah 12 bulan	N/A	N/A	100%	100%	100%	N/A	100%	100%
6	01	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Alat tulis kantor 17 jenis	N/A	N/A	100%	100%	100%	N/A	100%	100%
6	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- Laporan dan rencana tindaklanjut hasil konsultasi dan koordinasi,12 bulan - Laporan dan rencana tindaklanjut hasil rapat koordinasi, 12 bulan - Terselenggaranya konsultasi dan koordinasi : 1 tahun - Tersedianya makanan dan minuman rapat koordinasi : 1 tahun	- 100%	N/A	100%	100%	100%	- 100%	200%	100%
6	01	01	1.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Tertatanya arsip aktif dan inaktif di SKPD 12 bulan	100%	N/A	100%	100%	100%	N/A	100%	100%
6	01	01	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	- Tersusunnya modul integrasi data kepegawaian 1 modul - Blueprint pengembangan aplikasi pengawasan yang terintegrasi: 1 modul	- 100%	N/A	100%	100%	100%	- 100%	200%	100%
6	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
6	01	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Meubelair 11 jenis	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	200%	100^
6	01	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Alat Studio sesuai RKBMD : 1 jenis Tersedianya peralatan dan mesin lainnya: 1. Komputer : 3 unit 2. Lemari es : 2 unit 3. Televisi : 2 unit 4. Vertical blind : 343 m2 5. Trolley arsip : 1 unit 6. Tabung pemadam :10 unit	- 100%	N/A	100%	100%	100%	- 100%	200%	100%

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
6	01	01	1.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Gedung tempat kerja Tahap II : 100 %	N/A	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	01	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya: Instalasi system hydrant :100%	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	200%	100%
6	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
6	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pembelian Materai: 271 lembar Pembelian Materai :340 lembar	- 100%	N/A	100%	100%	100%	- 100%	200%	100%
6	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bukti pembayaran rekening telepon 5 sambungan, rekening listirk 500 Kwh, rekening air 10 m3 : 12 bulan	100%	N/A	100%	100%	100%	100%	200%	100%
6	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	- Gedung kantor seluas 1.838,38 m2 yang terpelihara kebersihannya, : 12 bulan - Pelayanan umum kantor yang terselesaikan dengan baik dan tepat waktu : 12 bulan 1. Pembayaran jasa keamanan kantor:12 bulan 2. Pembayaran jasa kebersihan kantor: 12 bulan 3. Pembayaran jasa pelayanan driver: 12 bulan 4. Pembayaran retribusi sampah: 12 bln	- 100%	N/A	100%	100%	100%	- 100%	200%	100%
6	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
6	01	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	- Bukti Pembayaran Pajak/STNK kend dinas/operasional roda 2 : 4 unit - Bukti Pembayaran Pajak/STNK kend dinas/operasional roda 4 : 13 unit - Kendaraan dinas/operasional roda 2 yang dipelihara sesuai RKBMD : 4 unit - Kendaraan dinas/operasional roda 4 yang dipelihara sesuai RKBMD : 13 unit	100%	N/A	100%	100%	100%	100%	200%	100%

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
6	01	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	- Peralatan gedung kantor yang dipelihara sesuai RKBMD : 7 jenis - Perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara sesuai RKBMD : 2 jenis Terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya : 1. Komputer:23unit 2. Laptop : 20 unit 3. Mesin fotocopy : 1 unit 4. AC : 23 unit 5. LCD : 3 unit	- 100%	N/A	100%	100%	100%	- 100%	200%	100%
6	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	- Persentase Kinerja Perangkat Daerah Pemerintahan, - Persentase Kinerja Perangkat Daerah Sosial Budaya, - Persentase Kinerja Perangkat Daerah Perekonomian - Persentase Kinerja Perangkat Daerah Sarana dan Prasarana	90%	N/A	88%	90,20%	102,50%	90%	209%	104.50%
6	01	02	1.01		Pelaksanaan Pengawasan Internal									
6	01	02	1.01	01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja Pemerintah Daerah : 16 LHP	100%	N/A	100%	100%	100%	100%	200%	100%
6	01	02	1.01	02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	- Laporan Cash Opname dan Stock Opname SKPD : 37 laporan - Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan Pemerintah Daerah : 137 LHP	100%	N/A	100%	100%	100%	100%	200%	100%
6	01	02	1.01	03	Reviu Laporan Kinerja	- Laporan Evaluasi Kinerja OPD : 37 LHE - Laporan Evaluasi LKJIP Pemerintah Daerah DIY : 1 LHE - Laporan Hasil Pendampingan dan Penyusunan Manajemen Resiko OPD : 37 laporan - Laporan Review Dokumen Perencanaan Pemerintah Daerah DIY : 1 laporan - Laporan Review Dokumen Perencanaan SKPD DIY sebelum tanggal persetujuan RAPBD Tahun n+1 : 37 laporan	100%	N/A	100%	100%	100%	100%	200%	100%
6	01	02	1.01	04	Reviu Laporan Keuangan	- Laporan Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD : 37 laporan - Laporan Review Laporan Keuangan Pemda DIY : 1 laporan	100%	N/A	100%	100%	100%	100%	200%	100%

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
6	01	02	1.01	05	Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	- Laporan EKPPD Kab/kota : 5 laporan - Laporan Hasil Pemeriksaan Umum/Teknis Pemerintah Kab/Kota : 16 LHP	100%	N/A	100%	100%	100%	100%	200%	100%
6	01	02	1.01	06	Kerjasama Pengawasan Internal	- Laporan Telaah sejawat antar Inspektorat Provinsi : 1 Laporan - Laporan telaah sejawat kabupaten/kota : 1 Laporan	100%	N/A	100%	100%	100%	100%	200%	100%
6	01	02	1.01	07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	- Laporan hasil monitoring dan tindaklanjut temuan pemeriksaan : 2 laporan	100%	N/A	100%	100%	100%	100%	200%	100%
6	01	02	1.02		Penyenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu									
6	01	02	1.02	01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Laporan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah : 4 LHP	100%	N/A	100%	100%	100%	100%	200%	100%
6	01	02	1.02	02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu : 86 LHP	100%	N/A	100%	100%	100%	100%	200%	100%
6	01	03			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENS	- Persentase Kinerja Perangkat Daerah Pemerintahan, - Persentase Kinerja Perangkat Daerah Sosial Budaya, - Persentase Kinerja Perangkat Daerah Perekonomian - Persentase Kinerja Perangkat Daerah Sarana dan Prasarana	100%	N/A	100%	100%	100%	100%	200%	100%
6	01	03	1.01	01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	- Keputusan Gubernur yang mengesahkan PKPT tahun n+1: 1 SK - Laporan Gelar Pengawasan Daerah : 1 laporan	100%	N/A	100%	100%	100%	100%	200%	100%
6	01	03	1.01	02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Laporan Pemutakhiran Tindaklanjut Hasil Pengawasan : 2 laporan	100%	N/A	100%	100%	100%	100%	200%	100%
6	01	03	1.02		Asistensi dan Pendampingan									
6	01	03	1.02	01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan pendampingan dan asistensi : 4 laporan	100%	N/A	100%	100%	100%	100%	200%	100%
6	01	03	1.02	02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Laporan Hasil Pelaksanaan PMPRB DIY Tahun n-1 : 1 laporan	100%	N/A	100%	100%	100%	100%	200%	100%

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=5+7+9)	11=(10/4)
6	01	03	1.02	03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	<ul style="list-style-type: none"> - Laporan Hasil monitoring dan evaluasi aksi Daerah Pencegahan, Pemberantasan Korupsi : 1 laporan - Laporan hasil pengendalian Gratifikasi Pemerintah Daerah : 1 laporan - Laporan tindaklanjut perjanjian APIP dan APH : 1 laporan - Laporan triwulanan atas perkembangan pelaksanaan tugas Saberpungli tepat waktu : 4 laporan 	100%	N/A	100%	100%	100%	100%	200%	100%
6	01	03	1.02	04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Laporan Survey Penilaian Integritas : 0 laporan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Tabel 2.5. Realisasi Kinerja Inspektorat (Urusan Penunjang Pemerintah Daerah – Pengawasan Pemerintah Daerah) Tahun 2022

No	Sasaran S9strategis/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Awal	Realisasi	Prosentase capaian	Tercapai	Tidak Tercapai	Keterangan
1	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Dan Pengendalian Internal	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	%	90	95,85	106,50	1	0	
						jumlah	1	0	
2	"d/h PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH Baru: PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN dan PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Kinerja Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan, Bidang Perekonomian, Bidang Sosial Budaya, Bidang Sarana dan Prasarana	%	90	95,85	106,50%	1	0	
						jumlah	1	0	

Sumber: Data diolah (2023)

Berdasarkan informasi di atas, kinerja pembangunan tahun hingga tahun 2022 yang dilaksanakan oleh Inspektorat DIY pada level sasaran OPD Eselon II memiliki capaian 106,50% yang berarti telah melebihi dari target yang telah ditetapkan. Demikian juga untuk kinerja Eselon III juga telah mencapai target yang telah ditetapkan.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan

Dengan semakin meningkatnya tuntutan dan harapan masyarakat atas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, bebas dari KKN serta agar mampu bersaing di bidang pengawasan, Inspektorat Daerah Iatimewa Yogyakarta terus menerus melakukan perubahan ke arah perbaikan kinerja.

Salah satu faktor utama yang dapat menunjang keberhasilan pelaksanaan pengendalian adalah efektifitas peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Untuk itu, APIP harus terus melakukan perubahan dalam menjalankan fungsinya guna memberi nilai tambah bagi penyelenggara pemerintah daerah. Hal ini sejalan dengan peran pengawasan

intern untuk mendorong peningkatan efektivitas manajemen risiko (*risk management*), pengendalian (*control*) dan tata kelola (*governance*) organisasi. APIP juga mempunyai tugas untuk melakukan pembinaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Pengawasan diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai, melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien.

Hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta sampai dengan Bulan Desember Tahun 2022 terdapat 944 rekomendasi dan yang telah ditindaklanjuti sejumlah 914 rekomendasi (96,82%). Hasil Pemeriksaan BPK RI sampai dengan tahun 2022 sebanyak 1.171 rekomendasi dan telah ditindaklanjuti 1.111 rekomendasi (94,88%), sehingga realisasi penyelesaian tindaklanjut hasil pemeriksaan menjadi sebesar 95,85% (rekomendasi yang selesai ditindaklanjuti/jumlah temuan $\times 100\%$ = $(914+1111)/(944+1171)\times 100\%$).

Capaian indikator kinerja tersebut dalam tabel dibawah ini:

Tabel 2.6. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Inspektorat

No	Indikator	SPM	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022 (thn n-2)	Tahun 2023 (thn n-1)	Tahun 2024 (thn n)	Tahun 2025 (thn n+1)	Tahun 2022 (thn n-2)	Tahun 2023 (thn n-1)	Tahun 2024 (thn n)	Tahun 2025 (thn n+1)	
1	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	-	-	85	-	-	-	90.20	-	-	-	Periode Renstra Inspektorat DIY Tahun 2017-2022. Capaian tersebut merupakan rata-rata penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan BPK, dan APIP
2	Kategori RB Perangkat Daerah			A	A	A	A	A	- *(TW II)	A	A	Periode Renstra Inspektorat DIY Tahun 2023-2026 (RPD).
3	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan			90%	91%	92%	92%	-	95,49% * *(TW II)	92%	92%	Periode Renstra Inspektorat DIY Tahun 2023-2026 (RPD).
4	Persentase kepatuhan pelaporan triwulanan Gratifikasi, <i>Whistle blowing system</i> dan Benturan Kepentingan			n/a	100%	100%	100%	-	100%* *(TW II)	100%	100%	Periode Renstra Inspektorat DIY Tahun 2023-2026 (RPD).
5	Katagori Reformasi Birokrasi Inspektorat DIY			A	A	A	A	A	- *(TW II)	A	A	Periode Renstra Inspektorat DIY Tahun 2022-2027.
6	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan			90%	91%	91,50%	92%	95.85%	95,49% * *(TW II)	91.50%	92%	Periode Renstra Inspektorat DIY Tahun 2022-2027.
7	Nilai Kapabilitas APIP			Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	█	Level 3	Level 3	Periode Renstra Inspektorat DIY Tahun 2022-2027.

Sumber : Data diolah, Inspektorat DIY, 2023

Dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan *consulting* Inspektorat DIY tahun 2022 telah dilaksanakan dengan program penyelenggaraan pengawasan dan program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi melalui kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan:

1. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal:

a. Sub kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah.

Pada sub kegiatan ini dilakukan pengawasan kinerja terhadap perangkat daerah bahwa program, kegiatan dan sub kegiatan yang ditetapkan pada OPD telah dilaksanakan secara ekonomis, efisien, dan efektif.

b. Sub Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah, antara lain :

Pengawasan regular, pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta yang berbasis resiko pada obyek pengawasan OPD-OPD. Hasil dari pengawasan berbentuk Laporan Hasil Pengawasan (LHP) yang disusun secara komprehensif (menyeluruh) meliputi 6 (enam) aspek, yaitu tugas pokok dan fungsi, aspek keuangan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, metode kerja/pengendalian intern serta implementasi pengurusan gender. Laporan Hasil Pemeriksaan disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri c.q. Irjen Kementerian Dalam Negeri dan Instansi terkait. Pengujian laporan berkala dan atau sewaktu-waktu dari OPD, pengawasan dilakukan terhadap dokumen Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) tiap bulan dari OPD Daerah Istimewa Yogyakarta. Merupakan catatan pemeriksaan awal sebelum melakukan pengawasan di obyek pengawasan.

Cash Opname dan *Stock Opname*, *Cash Opname* dan *Stock Opname* pada akhir Tahun Anggaran dilakukan secara serentak pada OPD di lingkungan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta atas kondisi akhir pengelolaan keuangan dan persediaan barang pakai habis dengan tujuan untuk percepatan penyusunan Laporan Keuangan pada neraca komponen aset lancar OPD. Hasilnya adalah memberikan keyakinan atas kondisi keuangan dan persediaan barang pada akhir tahun anggaran.

c. Sub kegiatan Reviu Laporan Kinerja, antara lain:

Evaluasi LKjIP, evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang dilaksanakan setiap tahun atas LKjIP yang telah disusun oleh Perangkat Daerah dengan tujuan untuk menilai penyajian dan pengungkapan informasi dalam LKjIP serta menilai penggunaan informasi. Hasilnya berupa LHE LKjIP yang berisi

rekomendasi. LHE LKjIP dilaporkan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Hal ini merupakan penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten dengan reformasi birokrasi yang berorientasi pada pencapaian outcomes dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. SAKIP merupakan integrasi dari sistem perencanaan penganggaran dan pelaporan kinerja yang terdiri dari Renstra, RKT dan Penetapan Kinerja yang meliputi pemenuhan pengukuran, kualitas pengukuran dan implementasi pengukuran.

Evaluasi implementasi SAKIP OPD yang meliputi kegiatan evaluasi terhadap perencanaan kinerja dan perjanjian kinerja termasuk penerapan anggaran berbasis kinerja, pelaksanaan program dan kegiatan, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal serta pencapaian kinerja, informasi kinerja yang dipertanggungjawabkan dalam laporan kinerja bukanlah satusatunya yang digunakan dalam menentukan nilai dalam evaluasi, akan tetapi juga termasuk berbagai hal pengetahuan yang dapat dihimpun guna mengukur keberhasilan ataupun keunggulan Perangkat Daerah.

Reviu Dokumen Perencanaan, dalam rangka peningkatan kualitas penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran tahunan daerah, serta untuk menjamin konsistensi dan keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran agar menghasilkan APBD yang berkualitas serta menjamin kepatuhan terhadap kaidah-kaidah perencanaan dan penganggaran termasuk didalamnya perencanaan dan penganggaran responsif gender, maka Kepala Daerah menugaskan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) sebagai *quality assurance* untuk melakukan reviu atas dokumen perencanaan dan penganggaran daerah.

Dokumen perencanaan tersebut meliputi : RPJMD, Renstra, RKPD/perubahan RKPD, Rencana Kerja SKPD/Perubahan Rencana Kerja SKPD, KUA-PPAS/Perubahan KUA-PPAS, RKA-SKPD/Perubahan RKA-SKPD dan RKA-PPKD/Perubahan RKA-PPKD.

d. Sub Kegiatan Reviu Laporan Keuangan, antara lain:

Pendampingan Penyusunan Laporan keuangan OPD, membantu OPD dalam melakukan proses penyusunan Laporan keuangan terkait dengan penetapan angka final pada aspek keuangan dan aset yang akan dijadikan sebagai angka-angka pada neraca OPD pada tahun yang berkenaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;

Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas, keandalan informasi/laporan keuangan yang memadai atas laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebelum disampaikan oleh Gubernur kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

e. Sub Kegiatan Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota, antara lain:

Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD), melakukan EKPPD terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Laporan Hasil Sementara EKPPD disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan Bupati/Walikota se Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pengawasan tehnis umum kabupaten/kota, melakukan pengawasan terkait dengan kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan di Kabupaten/Kota yaitu capaian standar pelayanan minimal atas pelayanan dasar, ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dalam pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren, dampak pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang dilakukan oleh pemerintah daerah, akuntabilitas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara dalam pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren di daerah dengan obyek pengawasan disepakati antara Inspektorat Provinsi dengan Inspektorat Kabupaten/Kota.

f. Sub Kegiatan Kerjasama Pengawasan Internal

Kerjasama pengawasan internal ini dilakukan antar Inspektorat Kabupaten/Kota dan antar Inspektorat Provinsi seluruh Indonesia yang tergabung dalam AAPII (Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia), yang dilakukan dalam bentuk telaah sejawat. Telaah sejawat dimaksudkan melakukan penilaian terhadap efisiensi dan efektivitas organisasi APIP sesuai dengan visi, misi, tugas dan fungsinya, dan harapan pimpinan tertinggi organisasi; menyatakan pendapat tentang kesesuaian aktivitas APIP dengan Standar Audit, memberikan saran perbaikan kinerja APIP agar dapat memberikan nilai tambah kepada organisasi, dengan menjamin bahwa audit telah dilaksanakan oleh auditor yang berkompeten dan dilengkapi dengan pedoman kerja yang memadai.

Melaksanakan pengawasan terpadu dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dan Inspektorat Jenderal Kementerian Teknis khususnya terkait ketugasan mandatory seperti pendampingan dan pengawasan terhadap penanganan covid-19, vaksinasi dan pemulihan 0000ekonomi nasional

- g. Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP, melakukan desk dengan OPD-OPD atas tindaklanjut hasil pemeriksaan BPK RI, Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dan APIP rutin setiap bulan.
2. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu:
- a. Sub Kegiatan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah
Melakukan proses penyelesaian kerugian Negara/daerah yang timbul karena Tuntutan Perbendaharaan, Tuntutan Ganti Rugi atau oleh pihak ke-3 baik karena hasil pemeriksaan APIP maupun BPK RI.
- b. Sub Kegiatan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu, antara lain:
Pengawasan dengan tujuan tertentu dan pengembangan temuan, melakukan pemeriksaan untuk mendorong berkurangnya pelanggaran/penyelewengan terlebih korupsi, kolusi dan nepotisme juga untuk meningkatkan akuntabilitas aparat pemerintah terhadap aspirasi yang berkembang dari masyarakat melalui pengaduan masyarakat, media masa, dan tugas khusus serta kasus pengembangan temuan hasil pemeriksaan;
Kegiatan pengusutan dilakukan apabila ada laporan/pengaduan dari masyarakat yang ditujukan kepada Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah (Presiden atau Gubernur) dan Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta mendapat perintah untuk mengadakan pemeriksaan dan pengusutan.
Reviu Dana Alokasi Khusus (DAK), untuk memberikan keyakinan terbatas, kehandalan dan keabsahan laporan, maka penyaluran DAK Fisik mensyaratkan agar laporan tersebut direviu oleh aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Daerah.
3. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan
- a. Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan, antara lain:
Menyelenggarakan Rapat Gelar Pengawasan Daerah (LARWASDA) untuk memaparkan temuan hasil pemeriksaan APIP antara lain hasil pemeriksaan: Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Inspektorat Jenderal Kementerian Teknis, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan DIY dan Inspektorat DIY yang dihadiri oleh semua Kepala OPD se Daerah Istimewa Yogyakarta, Kabupaten/Kota dan pihak-pihak terkait lainnya. Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta juga memaparkan temuan hasil pemeriksaan Kabupaten/Kota pada acara Rapat Gelar Pengawasan Daerah (LARWASDA) di Kabupaten/Kota masing-masing.

Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat DIY tahun 2023 yang diputuskan dengan Keputusan Gubernur.

- b. Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan, antara lain:

Melaksanakan Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah dengan Inspektorat Kabupaten/Kota dan mengikuti Rapat Koordinasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tingkat Nasional (RAKORWASDANAS) dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dan Inspektorat Jenderal Kementerian Teknis.

Berkontribusi dalam pengembangan profesi APIP melalui Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI)

Melaksanakan pemutakhiran data tindak lanjut hasil pengawasan tingkat Daerah dan mengikuti pemutakhiran data tindak lanjut hasil pengawasan APIP tingkat Nasional serta tindak lanjut dengan BPK.

4. Asistensi dan Pendampingan

- a. Sub Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah

Pendampingan guna memberikan keyakinan yang memadai bagi pencapaian efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset daerah, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang bersifat konsultatif kepada OPD terhadap hal-hal yang menjadi hambatan dan permasalahan.

Hasilnya adalah memberikan rekomendasi/ saran atas kelemahan terhadap pengelolaan tugas dan fungsi sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku serta pendampingan kepada OPD dalam penyusunan manajemen resiko masing-masing OPD.

- b. Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi

Penggerakan Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Pendampingan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) kepada OPD-OPD dilingkungan Pemda DIY.

- c. Sub Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, antara lain:

Membantu Tim Daerah dan Tim Pelaksana Teknis Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Stranas Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.

Mengkoodinasikan pemenuhan capaian indikator area intervensi pencegahan korupsi KPK yang meliputi : Perencanaan Penganggaran, Pengadaan Barang dan Jasa, Perizinan, Pengawasan APIP, Manajemen ASN, Optimalisasi Pajak Daerah, dan Manajemen Aset Daerah.

Membantu kelancaran Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar.

Kerjasama APIP-APH, dilaksanakan dalam rangka penanganan pengaduan masyarakat terkait indikasi korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Perjanjian kerja Sama (PKS) dilaksanakan antara Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dengan Aparat Penegak Hukum (APH), yaitu Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri)

- d. Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas
- Survei Penilaian Integritas (SPI) merupakan survei untuk memetakan risiko korupsi dan kemajuan upaya pencegahan korupsi yang dilakukan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (KLPD). Hasil pemetaan dapat dijadikan dasar untuk menyusun rekomendasi peningkatan upaya pencegahan korupsi melalui rencana aksi sesuai karakteristik masing-masing K/L/PD serta berdasarkan hasil pemetaan empiris. Penilaian bersumber dari persepsi dan pengalaman para pemangku kepentingan instansi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/PD), yaitu pegawai, pengguna layanan/mitra kerja sama, dan *ekspert/ahli* dari beragam kalangan. Penilaian mencakup transparansi, integritas dalam pelaksanaan tugas, perdagangan pengaruh (*trading in influence*), pengelolaan anggaran, pengelolaan PBJ, pengelolaan SDM, sosialisasi.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Dalam rangka mendukung terselenggaranya pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), peran pengawasan merupakan faktor penting dalam mendorong terwujudnya aparat pemerintah yang bersih, transparan dan akuntabel. Sesuai Pasal 16 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menentukan: Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan oleh APIP harus berdasarkan kompetensi yang dimiliki terkait dengan pelaksanaan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai fungsi dan kewenangannya serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada pasal 16 (3) disebutkan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilaksanakan oleh APIP sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan pada tahapan kegiatan:

- a. penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah;
- b. pelaksanaan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- c. pelaksanaan program strategi nasional di daerah;
- d. berakhirnya masa jabatan kepala daerah untuk mengevaluasi capaian rencana pembangunan jangka menengah daerah;
- e. pengawasan dalam rangka tujuan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah DIY Tahun 2024, tema pembangunan tahun 2024 yaitu "Pemerataan aksesibilitas Ekonomi berbasis Tema tersebut kemudian menjadi dasar penentuan prioritas Daerah DIY di tahun 2024 sebagai berikut:

1. Penurunan tingkat kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem;
2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak;
3. Peningkatan Kualitas SDM Yogyakarta;
4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah);
5. Penguatan *Good-governance* pada berbagai tingkatan;
6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tentram.

Inspektorat DIY pada perencanaan kerja tahun 2024 mendukung prioritas daerah "Penguatan *Good-governance* pada berbagai tingkatan" program/kegiatan/sub kegiatan di urusan pengawasan Pemerintah Daerah. Hal tersebut juga sinkron dengan dukungan pada pembangunan nasional, Prioritas Nasional sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2020-2024 yakni "Memperkuat Polihukam dan Transformasi Pelayanan Publik". Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 91 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Inspektorat mempunyai fungsi:

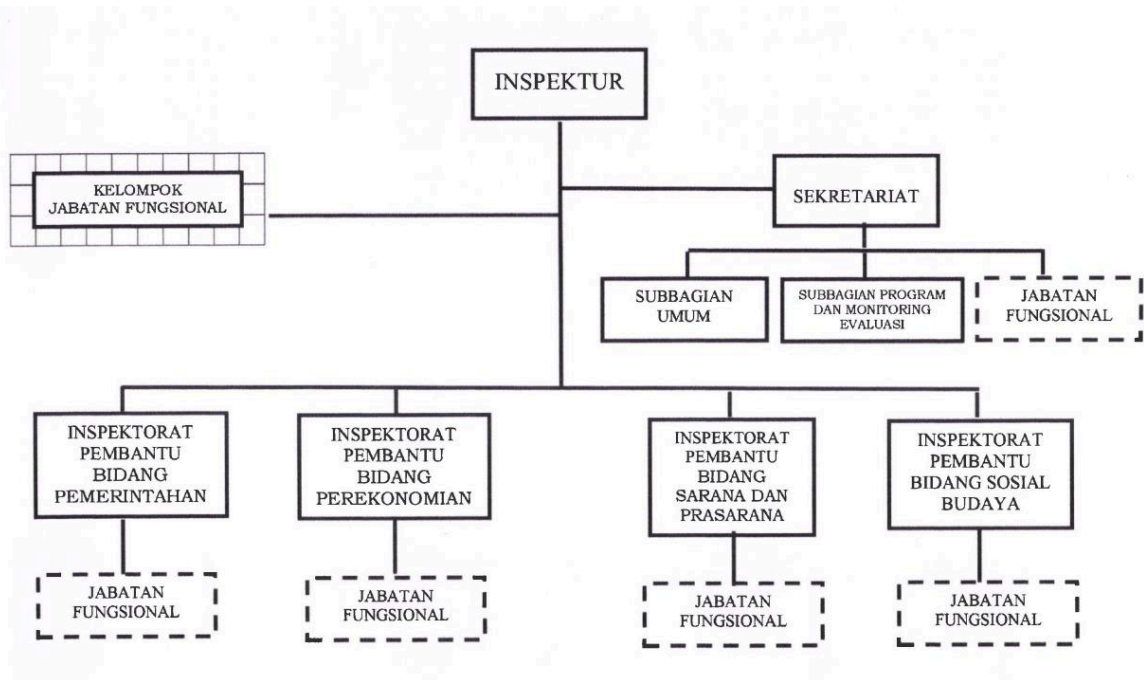
- a. perencanaan program kerja Inspektorat;
- b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
- c. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah;
- d. pengawasan pelaksanaan urusan keistimewaan;
- e. pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan.
- f. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;

- g. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- h. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengawasan;
- i. pengoordinasian, pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan di daerah Kabupaten/Kota;
- j. pengkoordinasian, pembinaan dan pengawaan urusan pemerintahan di bidang pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- k. penyelenggaraan kegiatan kesekretariatan;
- l. fasilitasi pembinaan reformasi birokrasi Inspektorat;
- m. fasilitasi penyusunan kebijakan proses bisnis Inspektorat;
- n. pengembangan teknologi Informasi dan komunikasi yang terintegrasi dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam lingkup Inspektorat;
- o. penyusunan laporan pelaksanaan tugas Inspektorat; dan
- p. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat.

Susunan Organisasi Inspektorat terdiri atas:

- a. Inspektur;
- b. Sekretariat, terdiri atas:
 - 1. Subbagian Umum;
 - 2. Subbagian Program dan Monitoring Evaluasi; dan
- c. Inspektorat Pembantu Bidang Pemerintahan;
- d. Inspektorat Pembantu Bidang Perekonomian;
- e. Inspektorat Pembantu Bidang Sosial Budaya;
- f. Inspektorat Pembantu Bidang Sarana dan Prasarana; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 2.1 Susunan Organisasi Perangkat Daerah



Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai pegawai sebanyak 86 (delapan puluh enam) orang per 30 Juni 2023 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.7. SDM Inspektorat DIY

No	Jabatan		Jumlah
1	Struktural	a. Inspektur (Eselon II.A)	1
		b. Sekretaris (Eselon III.A)	1
		c. Inspektur Pembantu (Eselon III.A)	4
		d. Kepala Sub Bagian (Eselon IV.A)	2
2	Fungsional tertentu	Auditor	38
		PPUPD	13
		Analisis Keuangan Pusat dan Daerah	0
3	Fungsional Umum	Staf	17
4		Tenaga bantu	10
	Jumlah		86

Sumber: Subbag Umum Inspektorat DIY (Tahun 2023)

Terkait jumlah auditor dan pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah (PPUPD) dibandingkan dengan jumlah jabatan fungsional berdasarkan Surat

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/449/M.SM.01.00/2023 tanggal 7 Maret 2023 dan Nomor B/51/M.SM.01.00/2023 tanggal 13 Maret 2023 perihal Persetujuan Usulan Kebutuhan Jabatan Fungsional di lingkungan Pemerintah Provinsi D.I. Yogyakarta masih terdapat kekurangan yaitu:

- Auditor kekurangan 69 orang;
- PPUPD kekurangan 37 orang

Kekurangan sebagaimana diatas diusahakan pemenuhannya melalui usulan penambahan pegawai ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Sedangkan untuk pemenuhan kompetensi jabatan fungsional Inspektorat bekerjasama dengan BKD dan Badan Pendidikan dan Pelatihan (Bandiklat).

Sarana dan prasarana sebagai pendukung Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu :

Tabel 2.8. Sarana dan Prasarana Pendukung

No	Uraian		Jumlah	Rupiah
	Jenis	Kelompok		
1	Peralatan dan Mesin	1. Alat Besar 2. Alat angkutan 3. Alat Pertanian 4. Alat Kantor dan Rumah Tangga 5. Alat studio, komunikasi dan Pemancar 6. Alat Kedokteran dan Kesehatan 7. Alat Laboratorium 8. Komputer	5 unit 17 unit 1 unit 783 unit 48 unit 6 unit 2 unit 195 unit	965.173.963,00 2.361.214.700,00 750.000,00 5.520.078.864,28 810.165.651,00 27.000.000,00 17.902.500,00 1.907.766.101,00
2	Gedung dan Bangunan	1. Bangunan Gedung 2. Tugu, titik control/pasti	4 unit 1	23.960.616.400,00 607.554.407,00
3	Jalan, Jaringan, Irigasi	1. Jalan dan jembatan 2. Bangunan Air 3. Instalasi 4. Jaringan	1 1 3 3	293.696.467,00 674.446.000,00 817.464.416,00 1.748.748.592,00
4	Aset Tetap Lainnya	Bahan Perpustakaan	794	37.427.461,00
5	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Aset Tetap Lainnya Dalam Pengerjaan	1	88.900.000,00
6	Aset lainnya	Aset Tak Berwujud	6	544.565.200,00
Jumlah				41.956.766.695,28

Sumber: Rekap Barang Inventaris per 31 Desember 2022 audited, Sub Bagian Umum.

Terkait dengan kondisi sarana dan prasarana yang ada di Inspektorat DIY dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Alat besar 5 unit terdiri dari electric genering set 1 unit, pompa 4 unit.
2. Alat angkutan 17 unit terdiri dari kendaraan dinas/operasional roda empat 13 unit dan kendaraan Dinas/Operasional roda dua 4 unit. Dari 13 unit kendaraan Dinas/Operasional roda empat yang digunakan untuk operasional pengawasan 10 unit, 1 unit untuk keperluan pimpinan (merupakan pengadaan tahun 2022) dan 2 unit untuk kebutuhan kesekretariatan, dengan kondisi terdapat 2 unit mobil (pembelian tahun 1996 dan tahun 2000) yang dalam kondisi sering mengalami kerusakan, direncanakan diusulan penghapusan pada tahun 2023. 10 unit kendaraan operasional yang digunakan untuk operasional pengawasan, yang terdiri 8 unit pengadaan tahun 2012 dan 2 unit pengadaan tahun 2013, kendaraan operasional pengawasan tersebut kurang memadai karena Tim yang ada sejumlah 16 Tim dengan obyek pemeriksaan yang berbeda-beda, kondisi ini merupakan hambatan aktivitas pemeriksaan. Untuk kendaraan dinas/operasional roda dua sebanyak 4 unit, 2 unit secara ekonomis sudah habis umurnya (pembelian tahun 2007), namun saat ini masih dimanfaatkan dan sering mengalami kerusakan. Dari 10 unit kendaraan operasional pengawasan terdapat 8 unit kendaraan yang membutuhkan overhaul, karena umur kendaraan sudah lebih 10 tahun serta untuk mempertahankan fungsi kendaraan untuk mendukung pelaksanaan pengawasan. Berdasarkan kondisi tersebut diperlukan penambahan 5 unit kendaraan Operasional roda empat dan 2 unit kendaraan dinas roda dua serta peremajaan kendaraan operasional pengawasan melalui pengadaan kendaraan dinas secara bertahap.
3. Alat kantor dan rumah tangga sebanyak 783 unit terdiri dari :
 - Alat Kantor 128 unit : mesin ketik 1 unit, alat penggandaan 1 unit, alat penyimpan perlengkapan kantor 89 unit (filing kabinet:15 unit, roll opeck : 5 unit, lemari kaca:12 unit, rak besi:48 unit, lemari makan: 3 unit), serta alat kantor lainnya 37 unit (CCTV : 30 unit, alat penghancur kertas: 6 unit, LCD projector: 1 unit).
 - Alat Rumah Tangga 381 unit : meubelair 251 unit, alat pendingin 81 unit (termasuk AC sentral), alat rumah tangga lainnya 14 unit, alat pemadam kebakaran 35 unit (alat pemadam kebakaran portable : 29 unit, tombol pemadam kebakaran/alarm: 6 set)
 - Meja dan kursi kerja/rapat pejabat 274 unit: meja kerja pejabat: 10 set/buah, meja rapat pejabat 10 unit, kursi kerja pejabat : 220 buah (termasuk pejabat non struktural), kursi hadap meja kerja pejabat: 12 buah, lemari arsip pejabat 4 unit

Terkait alat penyimpan perlengkapan kantor berupa filing kabinet 15 unit, 11 unit merupakan pengadaan tahun 1987, 1989, 1993 dan rak besi 48 unit, 44 unit merupakan

pengadaan tahun 2011 yang digunakan sebagai penyimpanan dokumen-dokumen pada ruangan kerja sekretariat maupun bidang-bidang dan penyimpanan dokumen-dokumen pengawasan di Depo Arsip, maka untuk memenuhi kebutuhan tersebut akan dilakukan pengadaan secara bertahap, diutamakan di ruang kerja bidang-bidang sebagaimana rekomendasi BPAD pada saat monitoring pengelolaan arsip OPD triwulan I tahun 2023.

4. Alat studio, komunikasi dan Pemancar sebanyak 48 unit meliputi :
 - a. alat studio 43 unit, terdiri dari :peralatan studio audio:18 unit (proyektor attachment 1 unit, UPS 2 unit, power amplifier 2 unit, professional sounsystem 2 unit, modulation monitor speaker kabaret 5 unit/set, audio mixing stasioner 1 unit, audio amplifier 2 unit, microphone wireless MC 3 unit),
 - b. peralatan studio pemetaan/peralatan ukur tanah: 10 unit (sketch master 5 unit, theodolite/peralatan ukur tanah 5 unit),
 - c. alat studio lainnya 15 unit (webcam 5 unit, speaker 5 unit, headset 5 unit);
 - d. alat komunikasi 3 set/unit : 2 set telephone/PABX, 1 unit faximili
 - e. peralatan pemancar 1 unit berupa power distribution board.
 - f. peralatan komunikasi untuk dokumentasi 1 unit berupa unit Remote Control

Terkait peralatan ukur dengan saat ini belum memenuhi kebutuhan alat dukung pengawasan, maka akan dilakukan pengadaan secara bertahap.
5. Komputer 195 unit terdiri dari:
 - personal komputer 82 unit (komputer PC 27 unit dan laptop 58 unit), 10 unit komputer PC merupakan pengadaan tahun 2003-2013 sering mengalami kerusakan serta 11 unit laptop merupakan pengadaan tahun 2008-2011 yang sering mengalami kerusakan sedangkan 2 unit pengadaan tahun 2016 dan 30 unit merupakan pengadaan tahun 2020 namun saat ini 3 laptop pengadaan tahun 2020 dalam kondisi rusak berat;
 - peralatan personal komputer 113 unit (printer 16 unit, scanner:25 unit, eksternal hardisk: 29 unit). Dari 16 unit printer 1 unit pengadaan tahun 2012, 1 unit pengadaan merupakan pengadaan tahun 2013 dan 14 unit merupakan pengadaan tahun 2016 sering mengalami kerusakan karena 1 unit printer digunakan untuk beberapa PC atau laptop, dan pada tahun 2022 telah diusulkan penghapusan sebanyak 20 unit sehingga saat ini kekurangan untuk memenuhi kebutuhan dalam mendukung pelaksanaan tupoksi.
 - peralatan jaringan komputer 43 unit (1 unit server, 1 unit hub, 7 unit switch rak, 12 unit wireless point, 16 switch, 6 set acces point).

Sehubungan dengan hal tersebut diperlukan pengadaan komputer, laptop dan printer untuk mendukung pelaksanaan tupoksi dan support terhadap perkembangan teknologi secara bertahap.

6. Aset tak berwujud sebanyak 6 terdiri dari:
 - a. 1 unit aplikasi system analisis spesifikasi hardware (sudah tidak berfungsi);
 - b. 1 unit aplikasi share point (sudah tidak berfungsi);
 - c. 1 unit aplikasi kearsipan LHP;
 - d. 1 unit aplikasi komputer hibah dari Kemendagri (sudah tidak berfungsi);
 - e. 1 unit aplikasi program kerja pengawasan (Siwaris);
 - f. 1 unit aplikasi SIM HP.

Inspektorat DIY telah mengembangkan Sistem Informasi untuk mendukung kegiatan pengawasan yang terdiri dari Sistem Informasi Hasil Pengawasan (SIM-HP) dan Sistem Informasi Pengawasan berbasis Risiko (SiWaris). Keberadaan dua sistem informasi ini masih belum memadai untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pengawasan dari perencanaan sampai dengan evaluasi. Untuk Itu Inspektorat di Tahun 2022 merancang sistem informasi terintegrasi yang akan diwujudkan dalam bentuk blueprint (cetak biru) Sistem Informasi Pengawasan Terintegrasi dengan konsep *Enterprise Resource Planning* (ERP) yaitu suatu model sistem informasi yang memungkinkan organisasi, dalam hal ini Inspektorat, untuk meng-otomasi dan meng-integrasikan proses-proses bisnis utamanya. ERP diharapkan dapat memecah kebuntuan berbagai hambatan fungsional tradisional dalam organisasi dengan cara mem-fasilitasi sharing/berbagai data, berbagai aliran informasi, dan mengenalkan/menyalurkan praktik-praktik bisnis yang umum diantara semua pengguna di Inspektorat DIY dan lebih luas lagi di Pemda DIY. Dengan konsep ERP ini, maka system informasi yang dimiliki Inspektorat DIY akan dilebur menjadi satu sistem informasi besar yang terintegrasi. Sistem informasi pengawasan terintegrasi ini akan mulai diimplementasikan pengembangannya secara bertahap mulai tahun 2023 mengacu pada *blueprint* yang telah disusun, dengan prioritas pengembangan *core business* pengawasan dan selanjutnya administrasi kesekretariatan.

7. Mulai tanggal 1 November 2022 Inspektorat DIY telah berkantor kembali di Gedung Inspektorat Jalan Cendana No 40 Yogyakarta, terkait gedung kantor dimaksud telah dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang sesuai dengan standar gedung pemerintahan maka diperlukan pemeliharaan gedung serta sarana dan prasarana gedung yang dilakukan secara rutin serta diperlukan *maintenance* khusus untuk sarana dan prasarana tertentu antara lain *genset*, *lift*, *AC* sentral, *hydrant*, jaringan saluran air bersih/air kotor, *cctv*, system tata suara dan *fire alarm*.

Adapun tantangan dan peluang terkait pelaksanaan tugas pengawasan Pemerintah Daerah antara lain sebagai berikut:

a. Tantangan

1. Penugasan mandatori dari K/L yang harus dilaksanakan Inspektorat dengan keterbatasan sumber daya yang dimiliki menuntut Inspektorat untuk memprioritaskan pengawasan kepada hal-hal berdasarkan tingkat risiko yang ada disamping harus semakin memperkuat kompetensi SDM yang dimiliki dengan berbagai pendidikan dan pelatihan yang dibutuhkan dalam pengawasan.
2. Belum memadainya sistem informasi untuk mendukung pengawasan berbasis TIK yang memudahkan proses pengawasan dari perencanaan sampai dengan pelaporan.
3. Tuntutan terhadap pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi.

b. Peluang

1. Inspektorat DIY sebagai pengemban tugas membantu gubernur dalam pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah sehingga Inspektorat memiliki kewenangan penuh melakukan pengawasan dan pembinaan di semua unit kerja yang berada di bawah kewenangan gubernur.
2. MoU kerjasama antara Inspektorat selaku Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dan Kepolisian dan Kejaksaan selaku Aparat Penegak Hukum (APH) terkait penanganan pengaduan masyarakat penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bebas dari korupsi.
3. Kondisi politik di Pemda DIY yang relatif stabil karena keistimewaan DIY dimana gubernur dan wakil gubernur dijabat oleh Sultan dan Paku Alam dengan penetapan, sehingga kebijakan yang dilaksanakan cenderung tidak berubah-ubah.
4. Adanya kebijakan persentase alokasi anggaran sesuai kelas besaran APBD dari Pemerintah daerah untuk peningkatan kompetensi APIP dan pemenuhan sarana prasarana pengawasan.

Berdasarkan kondisi tersebut diatas, maka Inspektorat menetapkan isu-isu penting dalam pelaksanaan tugas fungsi, antara lain :

1. pengawalan pelaksanaan reformasi kalurahan pada tingkat provinsi, kabupaten/kota;

2. pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem informasi pengawasan yang terintegrasi;
3. peningkatan kapasitas dan kapabilitas APIP terkait pemenuhan jumlah, jam diklat per orang;
4. implementasi kerjasama APIP-APH sesuai pemeranan masing-masing sesuai kewenangan.
5. pelaksanaan ketugasan mandatori pengawasan dari pusat antara lain reuiu Perencanaan Penganggaran, Pengadaan Barang dan Jasa, Perizinan, Manajemen ASN, Optimalisasi Pajak Daerah serta Manajemen Pajak Daerah;
6. pemenuhan alokasi anggaran pengawasan 0,6% dari belanja daerah untuk program dan kegiatan pengawasan serta sarana dan prasarana pengawasan;

Dalam pelaksanaan pengawasan di lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan menetapkan PKPT (Program Kerja Pengawasan Tahunan) yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur.

2.4. Review Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah

Review rancangan awal rencana kerja Inspektorat dilakukan dengan membandingkan antara rancangan awal rencana kerja tahun 2024 dengan hasil analisis kebutuhan Inspektorat Tahun 2024. Untuk melaksanakan kebijakan Pemerintah Daerah yang harus dilaksanakan dalam penganggaran tahun 2024, yang berakibat terdapat beberapa perubahan indikator, target capaian serta pagu indikatif sebagaimana hasil review yang disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.9. Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Su b kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Su b kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
INSPEKTORAT DIY					35.086.144.304					24.444.171.293	
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86.80	27.582.667.304	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86.80	18.398.890.493	
1.1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DIY	Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah, Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, serta Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	48.581.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DIY	Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah, Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, serta Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	192.000	
1.1.1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DIY	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	20.298.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DIY	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	64.000	Penyesuaian kemampuan pendanaan
1.1.2.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	DIY	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 dokumen	15.715.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	DIY	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 dokumen	64.000	Penyesuaian kemampuan pendanaan

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Su b kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Su b kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.3.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DIY	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 laporan	12.568.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DIY	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 laporan	64.000	Penyesuaian kemampuan pendanaan
1.2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	DIY	Terlaksananya penyiapan gaji dan tunjangan, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD, Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100%	19.081.713.304	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	DIY	Terlaksananya penyiapan gaji dan tunjangan, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD, Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100%	15.274.850.657	
1.2.1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DIY	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	90 Orang/ Bulan	19.023.877.304	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DIY	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	90 orang/ bulan	15.228.946.657	
1.2.2.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	DIY	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	46.320.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	DIY	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	45.840.000	

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Su b kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Su b kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.2.3.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	DIY	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	18 laporan	11.516.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	DIY	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	18 laporan	64.000	Penyesuaian kemampuan pendanaan
1.3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	DIY	Terlaksananya penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	100%	31.500.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	DIY	Terlaksananya penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	100%	13.200.000	
1.3.1.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	DIY	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	6 laporan	31.500.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	DIY	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	6 laporan	13.200.000	Penyesuaian kemampuan pendanaan
1.4.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	DIY	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai; Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	100%	646.700.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	DIY	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai; Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	100%	110.653.000	
1.4.1.	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	DIY	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2 dokumen	56.100.000	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	DIY	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2 dokumen	640.000	Penyesuaian kemampuan pendanaan

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Su b kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Su b kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.4.2.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	DIY	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	55 orang	590.600.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	DIY	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	7 orang	110.013.000	Penyesuaian kemampuan pendanaan
1.5.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	DIY	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD serta Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	100%	1.425.265.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	DIY	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD serta Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	100%	295.771.800	

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Su b kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Su b kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.5.1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	DIY	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 paket	32.500.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	DIY	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	56.000	
1.5.2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DIY	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 paket	84.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DIY	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3.00 Paket	14.697.000	Penyesuaian kemampuan pendanaan
1.5.3.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	DIY	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 paket	88.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	DIY	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3.00 Paket	8.322.800	Penyesuaian kemampuan pendanaan
1.5.4.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	DIY	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 paket	25.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	DIY	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12.00 Paket	100.000	Penyesuaian kemampuan pendanaan
1.5.5.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	DIY	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 dokumen	25.200.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	DIY	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	0	Penyesuaian kemampuan pendanaan
1.5.6.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DIY	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	531.428.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DIY	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12.00 Laporan	182.596.000	Penyesuaian kemampuan pendanaan

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Su b kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Su b kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.5.7.	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	DIY	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 dokumen	120.000.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	DIY	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1.00 Dokumen	90.000.000	Penyesuaian kemampuan pendanaan
1.6.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	DIY	Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Pengadaan Mebel, Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100%	4.283.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	DIY	Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Pengadaan Mebel, Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100%	776.000	
1.6.1.	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	DIY	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 unit	500.000.000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	DIY	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0	0	Sudah dilaksanakan tahun 2022

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Su b kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Su b kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.6.2.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DIY	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 unit	1.158.000.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DIY	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0.00 Unit	0	Penyesuaian kemampuan pendanaan
1.6.3.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DIY	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	120 unit	2.625.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DIY	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	143 Unit	776.000	Penyesuaian kemampuan pendanaan
1.7.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DIY	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	1.685.070.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DIY	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	1.499.214.843	
1.7.1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DIY	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	6.836.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DIY	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	2.440.000	Penyesuaian kebutuhan
1.7.2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DIY	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	420.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DIY	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	344.341.939	Penyesuaian kebutuhan

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Su b kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Su b kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.7.3.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DIY	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 laporan	68.200.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DIY	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Laporan	0	Penyesuaian kemampuan pendanaan
1.7.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DIY	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 paket	1.190.034.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DIY	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.152.432.904	Target capaian disesuaikan dg Permendagri
1.8.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DIY	Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan, Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya serta Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana	100%	1.399.975.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DIY	Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan, Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya serta Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana	100%	1.204.232.193	

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Su b kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Su b kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.8.1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	DIY	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 unit	42.900.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	DIY	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	36.226.000	Penyesuaian kebutuhan
1.8.2.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DIY	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 unit	385.875.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DIY	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16.00 Unit	400.262.393	Penyesuaian kebutuhan
1.8.3.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DIY	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 unit	486.200.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DIY	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	134.00 Unit	326.893.800	Perubahan indikator capaian disesuaikan dg laporan aset
1.8.4.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	DIY	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	105.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	DIY	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1.00 Unit	196.350.000	

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Su b kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Su b kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.8.5.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DIY	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	380.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DIY	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	244.500.000	
2.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	DIY	Persentase pengawasan yang sesuai PKPT bidang Pemerintahan, Sosial Budaya, Perekonomian serta Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	6.239.398.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	DIY	Persentase pengawasan yang sesuai PKPT bidang Pemerintahan, Sosial Budaya, Perekonomian serta Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	5.448.298.800	

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Su b kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Su b kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.1.	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	DIY	Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah, Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah, Reviu Laporan Kinerja, Reviu Laporan Keuangan, Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota, Kerjasama Pengawasan Internal, Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	100%	5.436.016.000	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	DIY	Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah, Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah, Reviu Laporan Kinerja, Reviu Laporan Keuangan, Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota, Kerjasama Pengawasan Internal, Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	100%	4.833.457.700	
2.1.1.	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	DIY	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	16 laporan	782.405.000	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	DIY	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	16.00 Laporan	315.664.000	Pagu disesuaikan dg kebutuhan sub kegiatan dan kemampuan pendanaan

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.1.2.	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	DIY	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	174 laporan	3.843.357.000	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	DIY	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	174 Laporan	2.910.009.100	Pagu disesuaikan dg kebutuhan sub kegiatan dan kemampuan pendanaan
2.1.3.	Reviu Laporan Kinerja	DIY	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	113 laporan	965.775.000	Reviu Laporan Kinerja	DIY	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	113 Laporan	850.304.000	Pagu disesuaikan dg kebutuhan sub kegiatan dan kemampuan pendanaan
2.1.4.	Reviu Laporan Keuangan	DIY	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	38 laporan	481.637.000	Reviu Laporan Keuangan	DIY	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	38 Laporan	212.624.000	Pagu disesuaikan dg kebutuhan sub kegiatan dan kemampuan pendanaan
2.1.5.	Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	DIY	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	21 laporan	428.563.000	Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	DIY	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	21 Laporan	369.681.000	Pagu disesuaikan dg kebutuhan sub kegiatan dan kemampuan pendanaan

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Su b kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Su b kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.1.6.	Kerjasama Pengawasan Internal	DIY	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	2 Kesepakatan	192.772.000	Kerjasama Pengawasan Internal	DIY	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	1.00 Kesepakatan	167.060.000	Pagu disesuaikan dg kebutuhan sub kegiatan dan kemampuan pendanaan
2.1.7.	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	DIY	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	2 Dokumen	36.585.000	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	DIY	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	2 Dokumen	8.115.600	Pagu disesuaikan dg kebutuhan sub kegiatan dan kemampuan pendanaan
2.2.	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	DIY	Terlaksananya Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah, Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	100%	922.217.000	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	DIY	Terlaksananya Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah, Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	100%	614.841.100	
2.2.1.	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	DIY	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	4 laporan	46.305.000	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	DIY	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	4 Laporan	15.400.000	Pagu disesuaikan dg kebutuhan sub kegiatan dan kemampuan pendanaan

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.2.2.	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	DIY	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	90 Laporan	875.912.000	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	DIY	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	70 Laporan	599.441.100	Indikator capaian disesuaikan dg ketugasan mandatory; Pagu disesuaikan dg kebutuhan sub kegiatan dan kemampuan pendanaan
3.	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	DIY	Persentase kepatuhan pelaporan gratifikasi, wistle blowing system dan benturan kepentingan	100%	1.264.079.000	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	DIY	Persentase kepatuhan pelaporan gratifikasi, wistle blowing system dan benturan kepentingan	100%	596.982.000	
3.1.	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	DIY	Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan, Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	100%	194.709.000	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	DIY	Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan, Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	100%	28.484.000	

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Su b kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Su b kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.1.1.	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	DIY	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	1 rekomendasi	58.125.000	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	DIY	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	1 Rekomendasi	320.000	Pagu disesuaikan dg kebutuhan sub kegiatan dan kemampuan pendanaan
3.1.2.	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	DIY	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	2 rekomendasi	136.584.000	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	DIY	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	2 Rekomendasi	28.164.000	Pagu disesuaikan dg kebutuhan sub kegiatan dan kemampuan pendanaan
3.2.	Pendampingan dan Asistensi	DIY	Terlaksananya Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah, Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta	100%	1.069.370.000	Pendampingan dan Asistensi	DIY	Terlaksananya Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah, Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi	100%	568.498.000	

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Su b kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Su b kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi , Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas					Birokrasi, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi , Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas			
3.2.1.	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	DIY	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	37 perangkat daerah	8.004.000	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	DIY	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	37 Perangkat Daerah	64.000	Pagu disesuaikan dg kebutuhan sub kegiatan dan kemampuan pendanaan
3.2.2.	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	DIY	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	37 perangkat daerah	52.699.000	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	DIY	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	37 Perangkat Daerah	2.528.000	Pagu disesuaikan dg kebutuhan sub kegiatan dan kemampuan pendanaan

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Su b kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Su b kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.2.3.	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	DIY	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	4 kegiatan	840.000.000	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	DIY	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	4 Kegiatan	403.206.000	Pagu disesuaikan dg kebutuhan sub kegiatan dan kemampuan pendanaan
3.2.4.	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	DIY	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	37 perangkat daerah	168.667.000	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	DIY	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	37 Perangkat Daerah	162.700.000	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat

Inspektorat DIY dalam menyusun Renja Inspektorat DIY DIY Tahun 2024 melibatkan berbagai pemangku kepentingan terkait melalui Forum OPD Inspektorat DIY DIY Tahun 2024 yang diadakan pada 20 Februari 2023. Disamping itu Inspektorat DIY turut memperhatikan informasi hasil pengamatan pelaksanaan/ lapangan. Informasi-informasi yang didapatkan atas pelaksanaan Forum OPD dan/atau hasil pengamatan pelaksanaan/lapangan kemudian ditelaah atas kesesuaiannya terkait dengan isu penting yang kemudian akan ditindaklanjuti melalui program, kegiatan, dan sub kegiatan yang diampu Inspektorat DIY di tahun 2024.

Tabel 2-10. Usulan Program, Kegiatan, dan Subkegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama Perangkat Daerah: Inspektorat DIY

No	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7
1	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

BAB 3 TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Inspektorat DIY melakukan telaahan terhadap Rencana Strategis (RENSTRA) Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 untuk menserasikan, mensinkronkan dan mensinergikan pencapaian sasaran pelaksanaan program dan kegiatan yang beririsan. Renstra Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam Renstra Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024, yaitu:

1. Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi (T2). Atas tujuan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan penentuan sasaran terkait yakni:
 - a. Sasaran T2.1: Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintah dalam negeri.
Indikator: 1) Tingkat kapabilitas auditor Kementerian Dalam Negeri; dan Tingkat kapasitas PPUPD secara nasional
 - b. Sasaran T2.1: Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif (SS7)
Indikator: 1) Indeks pengawasan Pemerintahan Daerah; dan 2) Indeks kapasitas Inspektorat Daerah
2. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (T3). Atas tujuan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan penentuan sasaran terkait yakni:
 - a. Sasaran T3.1: Terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang akuntabel dan berintegritas (SS11),
Indikator: 1) Indeks pengawasan internal; dan 2) Indeks penanganan pemeriksaan khusus.

Pelaksanaan pengawasan perlu disusun melalui perencanaan yang matang, sehingga tidak terjadi kegiatan pengawasan yang tumpang tindih pada obyek pemeriksaan yang sama. Terkait dengan hal tersebut dan mengacu pada Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024, Inspektorat DIY melaksanakan sinergitas kebijakan pengawasan di daerah dengan mengedepankan peran consulting dan quality assurance terhadap Obyek Pemeriksaan dan sekaligus untuk membantu dan mendorong agar visi misi Kepala Daerah Daerah DIY dapat dicapai secara optimal yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah DIY.

Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki fungsi pengawasan diharapkan mendukung Visi Misi Kepala Daerah dari sisi *Quality Assurance*, yang berarti dengan fungsi pengawasannya Inspektorat diberi tanggung jawab untuk menjamin kualitas kinerja perangkat daerah yang ada di lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dapat memenuhi standar-standar pelayanan dan operasional yang telah ditetapkan untuk mendukung capaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah

Tujuan merupakan gambaran suatu kondisi yang ingin dicapai atau dihasilkan. Dalam rangka mendukung capaian tujuan pembangunan DIY sebagaimana dicantumkan dalam Renstra Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2027, tujuannya adalah "akuntabilitas penyelenggaraan" . Adapun sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai atau dihasilkan secara nyata oleh Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta. Secara spesifik pada tahun 2024 target Kinerja Inspektorat DIY adalah sebagai berikut:

Tabel 33.1. Target Kinerja Inspektorat DIY Tahun 2024

No.	Sasaran / Program	Indikator Sasaran / Program	Target Tahun 2024
1	Sasaran 1 Meningkatnya Kualitas Hasil Pengawasan Internal	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	91,5%
1.1	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Pengawasan Yang Sesuai Program Kerja Pengawaan Tahunan (Pkpt) Bidang Pemerintahan, Sosial Budaya, Perekonomian Serta Sarana Dan Prasarana Aparatur	100%
2	Sasaran 2 Terwujudnya Pembinaan Dan Pengawasan Yang Baik Dengan Mengoptimalkan Fungsi Quality Assurance Dan Consulting	Nilai Kapabilitas APIP	Level 3
2.1	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Persentase Kepatuhan Pelaporan Gratifikasi, <i>Whistle Blowing System</i> , Dan Benturan Kepentingan	100%

No.	Sasaran / Program	Indikator Sasaran / Program	Target Tahun 2024
3	Sasaran 3 Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Perangkat Daerah	Kategori Reformasi Birokrasi Inspektorat DIY	A
3.1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai Pkki Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,80

Sumber: Renstra Inspektorat DIY Tahun 2022-2027 (2023)

3.3 Program, Kegiatan, dan Subkegiatan

Berdasarkan atas pertimbangan evaluasi kinerja periode sebelumnya isu penting penyelenggaraan tugas fungsi dan rencana strategis Inspektorat DIY periode tahun 2022-2027, maka pada tahun 2024 disusun Rencana kerja tahun 2024 yang akan dilaksanakan oleh Inspektorat DIY. Rencana kerja tersebut disusun dengan menggunakan nomenklatur program/kegiatan/ sub kegiatan yang telah diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah sebagaimana telah dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-13.17 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Tabel 3-2 Rekapitulasi Rencana Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024

No.	Urusan/ Bidang Urusan	Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	Jumlah Sub kegiatan	Total Pendanaan (Rp)	Sumber Pendanaan	Kelompok Sasaran
1	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	3	12	49	24.444.171.293	Pendapatan Asli Daerah	Pemerintah Daerah DIY

Tabel 3-3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024 Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (<i>outcome</i>), Kegiatan (<i>output</i>), dan subkegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
					Tahun (2024)		Prakiraan Maju Tahun (2025)			
					target	Rp	target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Terwujudnya akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan	Indeks Penilaian integritas	72,50	24.444.171.293		36.414.091.170	Inspektorat	
			Meningkatnya kualitas hasil pengawasan internal	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan	91,5%	5.448.298.800	92,0%	8.000.212.000	Inspektorat	
		6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase pengawasan yang sesuai Program Kerja Pengawaan Tahunan (PKPT) bidang Pemerintahan, Sosial Budaya, Perekonomian serta Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	5.448.298.800	100%	8.000.212.000	Inspektorat	
		6.01.02.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah, Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah, Reviu Laporan Kinerja, Reviu Laporan Keuangan, Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota, Kerjasama Pengawasan Internal, Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut HasilPemeriksaan APIP	100%	4.833.457.700	100%	7.030.884.000	Inspektorat	

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

	6.01.02.1.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	16.00 Laporan	315.664.000	16 laporan	508.525.000	Inspektorat	DIY
	6.01.02.1.01.02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	174 Laporan	2.910.009.100	174 laporan	4.300.525.000	Inspektorat	DIY dan luar DIY
	6.01.02.1.01.03	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	113 Laporan	850.304.000	113 laporan	996.564.000	Inspektorat	DIY
	6.01.02.1.01.04	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	38 Laporan	212.624.000	38 laporan	526.719.000	Inspektorat	DIY
	6.01.02.1.01.05	Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	21 Laporan	369.681.000	21 laporan	449.990.000	Inspektorat	DIY
	6.01.02.1.01.06	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	1.00 Kesepakatan	167.060.000	2 Kesepakatan	208.710.000	Inspektorat	DIY
	6.01.02.1.01.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	2 Dokumen	8.115.600	2 Dokumen	39.851.000	Inspektorat	DIY
	6.01.02.1.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Terlaksananya Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah, Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	100%	614.841.100	100%	969.328.000	Inspektorat	
	6.01.02.1.02.01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	4 Laporan	15.400.000	4 laporan	48.620.000	Inspektorat	DIY
	6.01.02.1.02.02	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	70 Laporan	599.441.100	100 Laporan	920.708.000	Inspektorat	DIY

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

		Terwujudnya Pembinaan dan Pengawasan yang baik dengan mengoptimalkan fungsi quality assurance dan consulting		Nilai Kapabilitas APIP	Level 3	596.982.000	Level 3	1.333.583.000	Inspektorat	
	6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI		Persentase kepatuhan pelaporan gratifikasi, whistle blowing system, dan benturan kepentingan	100 %	596.982.000	100%	1.333.583.000	Inspektorat	
	6.01.03.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan		Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan, Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	100%	28.484.000	100%	210.745.000	Inspektorat	
	6.01.03.1.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan		Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	1 rekomendasi	320.000	1 rekomendasi	63.132.000	Inspektorat	DIY
	6.01.03.1.01.02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan		Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	2 rekomendasi	28.164.000	2 rekomendasi	147.613.000	Inspektorat	DIY
	6.01.03.1.02	Pendampingan dan Asistensi		Terlaksananya Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah, Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	100%	568.498.000	100%	1.122.838.000	Inspektorat	

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

		6.01.03.1.02.01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	37 perangkat daerah	64.000	37 perangkat daerah	8.404.000	Inspektorat	DIY
		6.01.03.1.02.02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	37 perangkat daerah	2.528.000	37 perangkat daerah	55.334.000	Inspektorat	DIY
		6.01.03.1.02.03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	4 kegiatan	403.206.000	4 kegiatan	882.000.000	Inspektorat	DIY dan luar DIY
		6.01.03.1.02.04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	37 perangkat daerah	162.700.000	37 perangkat daerah	177.100.000	Inspektorat	DIY
	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di Perangkat Daerah			Kategori Reformasi Birokrasi Inspektorat DIY	A	18.398.890.493	A	27.080.296.170	Inspektorat	
		0.00.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,80	18.398.890.493	87,00	27.080.296.170	Inspektorat	
		0.00.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah, Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, serta Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	192.000	100%	55.824.000	Inspektorat	
		0.00.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	64.000	3 dokumen	21.313.000	Inspektorat	DIY

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

	0.00.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 dokumen	64.000	4 dokumen	21.313.000	Inspektorat	DIY
	0.00.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 laporan	64.000	5 laporan	13.198.000	Inspektorat	DIY
	0.00.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyediaan gaji dan tunjangan, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD, Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100%	15.274.850.657	100%	19.233.572.170	Inspektorat	
	0.00.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	90 orang/bulan	15.228.946.657	90 orang/bulan	19.175.071.170	Inspektorat	DIY
	0.00.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	45.840.000	12 dokumen	46.320.000	Inspektorat	DIY
	0.00.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 laporan	64.000	18 laporan	12.181.000	Inspektorat	DIY
	0.00.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	100%	13.200.000	100%	33.075.000	Inspektorat	
	0.00.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	6 laporan	13.200.000	6 laporan	33.075.000	Inspektorat	DIY
	0.00.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai; Pendidikan dan	100%	110.653.000	100%	677.200.000	Inspektorat	

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

				Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						
		0.00.01.1.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2 dokumen	640.000	2 Dokumen	56.600.000	Inspektorat	DIY
		0.00.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	7 orang	110.013.000	60 orang	620.600.000	Inspektorat	DIY dan luar DIY
		0.00.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan peralatan rumah tangga, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD serta Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	100%	295.771.800	100%	941.084.000	Inspektorat	
		0.00.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	56.000	12 paket	33.075.000	Inspektorat	DIY
		0.00.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3.00 Paket	14.697.000	12 paket	86.700.000	Inspektorat	DIY
		0.00.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3.00 Paket	8.322.800	12 paket	92.000.000	Inspektorat	DIY

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

	0.00.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12.00 Paket	100.000	12 paket	25.000.000	Inspektorat	DIY
	0.00.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	0	12 Dokumen	26.460.000	Inspektorat	DIY
	0.00.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12.00 Laporan	182.596.000	12 laporan	557.849.000	Inspektorat	DIY dan luar DIY
	0.00.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1.00 Dokumen	90.000.000	1 dokumen	120.000.000	Inspektorat	DIY
	0.00.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Pengadaan Mebel, Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100%	776.000	100%	2.944.000.000	Inspektorat	
	0.00.01.1.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0	0	0 unit	0	Inspektorat	DIY
	0.00.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0.00 Unit	0	4 unit	1.544.000.000	Inspektorat	DIY
	0.00.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	143 Unit	776.000	100 unit	1.400.000.000	Inspektorat	DIY

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

		0.00.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	1.499.214.843	100%	1.761.913.000	Inspektorat	
		0.00.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	2.440.000	12 laporan	7.177.000	Inspektorat	DIY
		0.00.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	344.341.939	12 laporan	480.000.000	Inspektorat	DIY
		0.00.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Laporan	0	12 laporan	72.000.000	Inspektorat	DIY
		0.00.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.152.432.904	12 Laporan	1.202.736.000	Inspektorat	DIY
		0.00.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Pemeliharaan Mebel, Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya serta Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100%	1.204.232.193	100%	1.433.628.000	Inspektorat	
		0.00.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	36.226.000	1 unit	45.700.000	Inspektorat	DIY

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

	0.00.01.1.09.01 0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	16.00 Unit	400.262.393	1 unit	380.000.000	Inspektorat	DIY
	0.00.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	134.00 Unit	326.893.800	22 unit	405.168.000	Inspektorat	DIY
	0.00.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1.00 Unit	196.350.000	70 unit	492.510.000	Inspektorat	DIY
	0.00.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	244.500.000	1 unit	110.250.000	Inspektorat	DIY

BAB 4 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program kerja, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan Inspektorat DIY tahun 2024 dengan indikator kinerja dijabarkan dalam 3 (tiga) program, 12 (dua belas) kegiatan dan 39 (tiga puluh sembilan) sub kegiatan.

Pagu indikatif sebagaimana Renstra Inspektorat DIY direncanakan sebesar Rp24.444.171.293,00 terdiri dari:

1. Belanja operasi sebesar Rp24.443.395.293,00
2. Belanja modal sebesar Rp 776.000,00

Rumusan rencana program kerja, kegiatan dan sub kegiatan Inspektorat DIY tahun 2024 disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 4.1 Tabel Rencana Kerja dan Pendanaan Inspektorat DIY Tahun 2024

Kode	Urusan /Bidang Urusan /Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
		INSPEKTORAT								24.444.171.293					36.414.091.170		
6		UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN								24.444.171.293					36.414.091.170		
6	01	INSPEKTORAT DAERAH								24.444.171.293					36.414.091.170		
6	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								18.398.890.493				27.080.296.170	
6	01	01	1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								192.000				55.824.000	
6	01	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah												
					Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah, Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, serta Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	86,8 Angka	3 Dokumen	100 %	64.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	21.313.000	
6	01	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD												

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

Kode	Urusan /Bidang Urusan /Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah, Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, serta Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	86,8 Angka	4.00 Dokumen	100 %	64.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4.00 Dokumen	21.313.000	
6	01	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										
		Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah, Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, serta Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	86,8 Angka	5.00 Laporan	100 %	64.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.00 Laporan	13.198.000	
6	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				15.274.850.657						19.233.572.170
6	01	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

Kode	Urusan /Bidang Urusan /Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya Penyediaan gaji dan tunjangan, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD, Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	86,8 Angka	90.00 Orang/ Bulan	100 %	15.228.946.657	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	90.00 Orang/ Bulan	19.175.071.170	
6	01	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD										
		Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penyediaan gaji dan tunjangan, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD, Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	86,8 Angka	12.00 Dokumen	100 %	45.840.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12.00 Dokumen	46.320.000	
6	01	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD										

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

Kode	Urusan /Bidang Urusan /Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Terlaksananya Penyediaan gaji dan tunjangan, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD, Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	86,8 Angka	18 Laporan	100 %	64.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	12.181.000	
6	01	01	1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					13.200.000					33.075.000	
6	01	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD										
		Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	86,8 Angka	6.00 Laporan	100 %	13.200.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	6.00 Laporan	33.075.000	
6	01	01	1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					110.653.000					677.200.000	
6	01	01	1.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai										

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

Kode	Urusan /Bidang Urusan /Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai; Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	86,8 Angka	2.00 Dokumen	100 %	640.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2.00 Dokumen	56.600.000	
6	01	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi										
		Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai; Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	86,8 Angka	7 Orang	100 %	110.013.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	7 Orang	620.600.000	
6	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				295.771.800					941.084.000	
6	01	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor										

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

					Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan peralatan rumah tangga, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD serta Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	86,8 Angka	1,00 Paket	100 %	56.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1,00 Paket	33.075.000,
6	01	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor											

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

Kode	Urusan /Bidang Urusan /Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan peralatan rumah tangga, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD serta Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	86,8 Angka	3.00 Paket	100 %	14.697.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3.00 Paket	86.700.000
6	01	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

Kode	Urusan /Bidang Urusan /Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan peralatan rumah tangga, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD serta Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	86,8 Angka	3.00 Paket	100 %	8.322.800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3.00 Paket	92.000.000,
6	01	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

Kode	Urusan /Bidang Urusan /Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan peralatan rumah tangga, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD serta Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	86,8 Angka	12.00 Paket	100 %	100.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12.00 Paket	25.000.000
6	01	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan									

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

Kode	Urusan /Bidang Urusan /Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan peralatan rumah tangga, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD serta Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	86,8 Angka	12 Dokumen	100 %	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12 Dokumen	26.460.000	
6	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

Kode	Urusan /Bidang Urusan /Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan peralatan rumah tangga, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD serta Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	86,8 Angka	12.00 Laporan	100 %	182.596.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12.00 Laporan	557.849.000	
6	01	01	1.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD										

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

Kode	Urusan /Bidang Urusan /Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan peralatan rumah tangga, Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD serta Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	86,8 Angka	1.00 Dokumen	100 %	90.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1.00 Dokumen	120.000.000	
6	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				776.000						2.944.000.000,
6	01	01	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

Kode	Urusan /Bidang Urusan /Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	86,8 Angka	0.00 Unit	100 %	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0.00 Unit	1.544.000.000,	
6	01	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
		Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Pengadaan Mebel, Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	86,8 Angka	143 Unit	100 %	776.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	143 Unit	1.400.000.000	

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

Kode	Urusan /Bidang Urusan /Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
6	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.499.214.843					1.761.913.000
6	01	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat											
					Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	86,8 Angka	12 Laporan	100 %	2.440.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	7.177.000
6	01	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											
					Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	86,8 Angka	12 Laporan	100 %	344.341.939	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	480.000.000
6	01	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor											

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

Kode	Urusan /Bidang Urusan /Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	86,8 Angka	0 Laporan	100 %	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Laporan	72.000.000	
6	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										
		Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	86,8 Angka	12 Laporan	100 %	1.152.432.904	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.202.736.000	
6	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.204.232.193					1.433.628.000	
6	01	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan										

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

Kode	Urusan /Bidang Urusan /Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Jabatan; Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan; Pmeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya; Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya; dan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	86,8 Angka	1 Unit	100 %	36.226.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	45.700.000
6	01	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

Kode	Urusan /Bidang Urusan /Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan; Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan; Pmeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya; Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya; dan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	86,8 Angka	16.00 Unit	100 %	400.262.393	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16.00 Unit	405.168.000	
6	01	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya										

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

Kode	Urusan /Bidang Urusan /Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan; Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan; Pmeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya; Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya; dan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	86,8 Angka	134.00 Unit	100 %	326.893.800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	134.00 Unit	492.510.000	
6	01	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya										

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

Kode	Urusan /Bidang Urusan /Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan; Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan; Pmeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya; Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya; dan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	86,8 Angka	1.00 Unit	100 %	196.350.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Di rehabilitasi	1.00 Unit	110.250.000	
6	01	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

Kode	Urusan /Bidang Urusan /Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
		Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan; Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan; Pmeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya; Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya; dan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	86,8 Angka	1 Unit	100 %	244.500.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Di rehabilitasi	1 Unit	380.000.000		
6	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN						5.448.298.800						8.000.212.000	
6	01	02	1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal						4.833.457.700					7.030.884.000	
6	01	02	1.01	0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah											

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

Kode	Urusan /Bidang Urusan /Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Persentase pengawasan yang sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) bidang Pemerintahan, Sosial Budaya, Perekonomian serta Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah, Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah, Reviu Laporan Kinerja, Reviu Laporan Keuangan, Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota, Kerjasama Pengawasan Internal, Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah, Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, serta Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	16.00 Laporan	100 % 100 %	315.664.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	16.00 Laporan	508.525.000
6	01	02	1.01	0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah									

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

Kode	Urusan /Bidang Urusan /Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Persentase pengawasan yang sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) bidang Pemerintahan, Sosial Budaya, Perekonomian serta Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah, Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah, Reviu Laporan Kinerja, Reviu Laporan Keuangan, Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota, Kerjasama Pengawasan Internal, Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah, Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, serta Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	174 Laporan	100 %	2.910.009.100	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	174 Laporan	4.300.525.000
6	01	02	1.01	0003	Reviu Laporan Kinerja									

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

Kode	Urusan /Bidang Urusan /Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Persentase pengawasan yang sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) bidang Pemerintahan, Sosial Budaya, Perekonomian serta Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah, Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah, Reviu Laporan Kinerja, Reviu Laporan Keuangan, Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota, Kerjasama Pengawasan Internal, Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah, Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, serta Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	113 Laporan	100 % 100 %	850.304.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	113 Laporan	996.564.000
6	01	02	1.01	0004	Reviu Laporan Keuangan									

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

Kode	Urusan /Bidang Urusan /Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Persentase pengawasan yang sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) bidang Pemerintahan, Sosial Budaya, Perekonomian serta Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah, Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah, Reviu Laporan Kinerja, Reviu Laporan Keuangan, Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota, Kerjasama Pengawasan Internal, Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah, Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, serta Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	38 Laporan	100 % 100 %	212.624.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	38 Laporan	526.719.000
6	01	02	1.01	0005	Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota									

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

Kode	Urusan /Bidang Urusan /Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Persentase pengawasan yang sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) bidang Pemerintahan, Sosial Budaya, Perekonomian serta Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten /Kota	Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah, Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah, Reviu Laporan Kinerja, Reviu Laporan Keuangan, Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota, Kerjasama Pengawasan Internal, Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah, Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, serta Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	21 Laporan	100 %	369.681.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	21 Laporan	449.990.000
6	01	02	1.01	0006	Kerjasama Pengawasan Internal									

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

Kode	Urusan /Bidang Urusan /Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Persentase pengawasan yang sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) bidang Pemerintahan, Sosial Budaya, Perekonomian serta Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah, Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah, Reviu Laporan Kinerja, Reviu Laporan Keuangan, Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota, Kerjasama Pengawasan Internal, Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah, Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, serta Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1.00 Kesepakatan	100 %	167.060.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	1.00 Kesepakatan	208.710.000
6	01	02	1.01	0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP									

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

Kode	Urusan /Bidang Urusan /Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		Persentase pengawasan yang sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) bidang Pemerintahan, Sosial Budaya, Perekonomian serta Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah, Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah, Reviu Laporan Kinerja, Reviu Laporan Keuangan, Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota, Kerjasama Pengawasan Internal, Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah, Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, serta Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	2 Dokumen	100 %	8.115.600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	2 Dokumen	39.851.000	
6	01	02	1.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu					614.841.100						969.328.000
6	01	02	1.02	0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah										

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

Kode	Urusan /Bidang Urusan /Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
		Persentase pengawasan yang sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) bidang Pemerintahan, Sosial Budaya, Perekonomian serta Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	Terlaksananya Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah, Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	4 Laporan	100 %	15.400.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	4 Laporan	48.620.000		
6	01	02	1.02	0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu											
					Persentase pengawasan yang sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) bidang Pemerintahan, Sosial Budaya, Perekonomian serta Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Terlaksananya Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah, Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	70 Laporan	100 %	599.441.100	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	70 Laporan	920.708.000
6	01	03			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI				596.982.000						1.333.583.000	

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

Kode	Urusan /Bidang Urusan /Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
6	01	03	1.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan						28.484.000					210.745.000	
6	01	03	1.01	0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan											
					Persentase kepatuhan pelaporan gratifikasi, whistle blowing system, dan benturan kepentingan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan, Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Rekomendasi	100 %	320.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	1 Rekomendasi	63.132.000
6	01	03	1.01	0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan											
					Persentase kepatuhan pelaporan gratifikasi, whistle blowing system, dan benturan kepentingan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	2 Rekomendasi	100 %	28.164.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	2 Rekomendasi	147.613.000
6	01	03	1.02	Pendampingan dan Asistensi						568.498.000					1.122.838.000	
6	01	03	1.02	0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah											
					Persentase kepatuhan pelaporan gratifikasi, whistle blowing system, dan benturan kepentingan	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan	Terlaksananya Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah, Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi,	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	37 Perangkat Daerah	100 %	64.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	37 Perangkat Daerah	8.404.000

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

Kode	Urusan /Bidang Urusan /Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
			Pemerintahan Daerah	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas												
6	01	03	1.02	0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi											
					Persentase kepatuhan pelaporan gratifikasi, whistle blowing system, dan benturan kepentingan	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Terlaksananya Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah, Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	37 Perangkat Daerah	100 %	2.528.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	37 Perangkat Daerah	55.334.000,00
6	01	03	1.02	0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi											

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

Kode	Urusan /Bidang Urusan /Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		Persentase kepatuhan pelaporan gratifikasi, whistle blowing system, dan benturan kepentingan	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Terlaksananya Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah, Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	4 Kegiatan	100 %	403.206.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	4 Kegiatan	882.000.000	
6	01	03	1.02	0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas										

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

Kode	Urusan /Bidang Urusan /Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Persentase kepatuhan pelaporan gratifikasi, whistle blowing system, dan benturan kepentingan	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Terlaksananya Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah, Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	37 Perangkat Daerah	100 %	162.700.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	37 Perangkat Daerah	177.100.000


BAB 5 PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 disusun sebagai acuan pada penyusunan rencana kerja dan anggaran dalam rangka pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2024 sesuai dengan sasaran dan tujuan yang ditargetkan dalam rangka mendukung visi dan misi Pemerintahan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Rencana kerja ini merupakan bagian dari tahapan pelaksanaan Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2022-2027.

Atas rencana kerja tahun 2024 diperlukan adanya pelaksanaan yang terarah, terkoordinasi secara intensif bersinergi dengan keseluruhan unit/instansi yang terkait baik internal maupun eksternal. Monev terhadap capaian kinerja sasaran agar terus dilakukan, sehingga upaya pencapaian dapat dikontrol dengan baik, termasuk identifikasi faktor-faktor yang dimungkinkan menjadi penghambat capaian. Selanjutnya agar akuntabilitas terjaga, dukungan data dan mekanisme pengukuran kinerja perlu didokumentasikan secara baik.

Yogyakarta, 27 Juli 2023

INSPEKTUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



MUHAMMAD SETIADI, S.Pt., M.Acc.

Formulir E.29
Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan
Rancangan Renja Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta
Tahun 2024

No.	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Ada Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah provinsi dan Agenda Kerja Perangkat Daerah provinsi.	√			
2	Pengolahan data dan informasi	√			
3	Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah	√			
4	Mengkaji hasil evaluasi renja-Perangkat Daerah provinsi tahun lalu berdasarkan Renstra-Perangkat Daerah provinsi.	√			
5	Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah provinsi.	√			
6	Penelaahan rancangan awal RKPD provinsi.	√			
7	Perumusan tujuan dan sasaran.	√			
8	Penelaahan usulan masyarakat.	√			
9	Perumusan kegiatan prioritas.	√			
10	Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah provinsi.	√			
10a	Menyelaraskan program dan kegiatan Perangkat Daerah provinsi dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang kabupaten/kota.	√			
10b	Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan Perangkat Daerah provinsi sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah provinsi.	√			
10c	Mensinkronkan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah provinsi dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan.	√			
10d	Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah provinsi sesuai surat edaran Gubernur.	√			
11	Sasaran program dan kegiatan Perangkat Daerah provinsi disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu.	√			
12	Program dan kegiatan antar Perangkat Daerah provinsi dengan Perangkat Daerah lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah telah dibahas dalam forum Perangkat Daerah provinsi.	√			
13	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah provinsi telah menyusun dan memperhitungkan prakiraan maju.	√			
14	Dokumen Renja Perangkat Daerah provinsi yang telah disyahkan.	√			

Yogyakarta, 27 Juli 2023
 INSPEKTUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 INSPEKTORAT

 MUHAMMAD SETIADI, S.Pt., M.Acc



INSPEKTORAT
DAERAH STIMEWA ØGYAKARTA